PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PASCA KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926 TAHUN 1984-1994

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:
Ahmad Khoiron Minan
NIM. A72214030

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : AHMAD KHOIRON MINAN

NIM : A72214030

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari terbukti bukan hasil karya saya sendiri, maka bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 7 Juli 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BFC9EADF671569309
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AHMAD KHOIRON MINAN
A72214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 10 Juli 2018

Oleh

Pembimbing

H. Ali Muhdi, M.Si.
NIP. 197206262007101005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada tanggal 26 Juli 2018

Ketua Penguji I

H. Ali Muhdi, M.Si.
NIP. 197206262007101005

Penguji II

Drs. H. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 195509041985031001

Penguji III

Drs. H. M. Ridwan, M.Ag.
NIP. 195907171987031001

Sekretaris Penguji IV

Dr. H. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag.
NIP. 196210012992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad. Khoiron. Minan
NIM : A72219030
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah peradaban Islam
E-mail address : minansendang@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Partai Persatuan pembangunan pasca kembalinya NU ke Khittah 1926 Tahun 1984 - 1994

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ah. Khoiron. Minan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang **"Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU Ke Khittah 26 Tahun 1984-1994"** meneliti beberapa masalah, yakni: (1). Bagaimana Sejarah dan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan sebelum kembalinya NU ke khittah 1926 ? (2). Bagaimana proses dan dinamika antara NU dan PPP untuk menuju khittah 1926 ? (3). Bagaimana dinamika politik Partai Persatuan Pembangunan Pasca kembalinya NU ke khittah 1926?

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu: *Heuristik* (pengumpulan sumber), *Verifikasi* (kritik sumber), *Interpretasi* (penafsiran sumber) dan *Historiografi* (penulisan sejarah). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dengan perspektif diakronis (mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara kronologis dengan memperhatikan waktu, tempat dan objek yang dilakukan dalam sebuah kajian yang rinci dan mendalam). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Challenge and Response* (tantangan dan jawaban) yang dikemukakan oleh Arnold J. Toynbee, dengan menggunakan teori ini penulis mampu menjelaskan tantangan NU ketika berada di tubuh PPP yang pada awalnya berpengaruh tetapi kemudian dipinggirkan, dan NU memberikan jawaban untuk kembali ke Khittah dan keluar dari PPP begitu pula dengan tantangan PPP setelah NU memutuskan untuk kembali ke khittah, PPP memberikan jawabannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari empat partai yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti, yang dilatarbelakangi kebijakan pemerintahan orde baru. PPP merupakan satu-satunya partai politik Islam yang dalam perkembangannya PPP mampu meraih 99 kursi di DPR RI pada pemilihan umum tahun 1977 dan mendapatkan 96 kursi di DPR RI pada pemilihan umum tahun 1982. (2) Proses NU menuju khittah sudah disuarakan pada tahun 1956 dan baru disepakati bersama pada tahun 1984, terdapat upaya tarik menarik antara kubu NU yang menginginkan untuk keluar dari politik dan kubu NU yang menginginkan agar NU tetap berpolitik melalui PPP. (3) setelah kembalinya NU ke khittah terdapat berbagai perubahan sikap PPP terhadap NU, pada masa H. Djailani Naro yang melakukan upaya menghadapi penggembosan yang dilakukan oleh NU dan pada masa Buya Isma'il Metareum yang melakukan pendekatan terhadap NU untuk mengembalikan suara NU kepada PPP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis under title **"Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU Ke Khittah 26 Tahun 1984-1994"** research question of this are: (1). How are the history and development of *Partai Persatuan Pembangunan* before *NU* comes back to *khittah* 1926? (2). How are the process and dynamics between *NU* and *PPP* to *khittah* 1926 (3). How is dynamic political on *Partai Persatuan Pembangunan* after *NU* comes back to *khittah* 1926?

This thesis uses historical research method: Heuristic (collecting sources), Verification (critic sources), Interpretation (interpreting sources), and Historiography (writing history). This thesis uses historical approach with diacronize (description events in the past chronologically focus on time, place, and object that uses on the research). In other hand, this research use theory of challenge and response by Arnold J. Toynbee, with this theory researcher can explain NU's development under *PPP*'s coalition; have great influence at first and marginalized at last, and *NU* comes back to the *khittah* and exit as the answer of *PPP's* action then *PPP* give their answer about *NU*'s action.

From this research, researcher can conclude: (1) *Partai Persatuan Pembangunan* is fusion of four parties: *NU, Parmusi, PSII,* and *Perti*, cause of new era's government policy. *PPP* is the only Islamic politic party which has 99 chairs in *DPR* Indonesian republic on public election 1982. (2). *NU*'s processes to khittah start from 1956 and agree in 1984, in the period 1956 and 1984 there were disagreement in the NU's members; members who want to leave politic and members who want *NU* use their politic power in *PPP*. (3). After *NU* come back to *khittah* , *PPP* change their policy on *NU*; in H. Djailani Naro's period, he does some movement to face *NU's* member resistance to decrease their sound in the public election and Buya Isma'il Metareum's period, he does some approach to bring *NU's* come back to *PPP*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

TABEL TRANSLITERASI ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTARCT ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 12

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 12

F. Penelitian Terdahulu 14

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN SEBELUM KEMBALINYA NU KE KHITTAH 26

A. Latar Belakang Lahirnya Partai Persatuan Pembangunan ... 23

B. Perkembangan Partai Persatuan Pembanguan Sebelum Kembalinya NU ke Khittah 26 37

C. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 dan Pemilihan Umum Tahun 1982 43

BAB III : PROSES DAN DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA DENGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENUJU KHTTAH 1926

A. Latar Belakang Kembalinya NU ke Khittah 1926 46

B. Dinamika PPP dan NU Dalam Menuju Khittah 1926..... 65

C. Tokoh NU dan PPP Dalam Peristiwa Khittah 1926 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : DINAMIKA POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PASCA KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926 (1984-1994)

A. Partai Persatuan Pembanguna pada Masa Kepemimpinan H. Djailani Naro (1984-1989) 84

B. Partai Persatuan Pembanguna pada Masa Kepemimpinan Isma'il Hasan Metarium (1989-1994)..... 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Persatuan Pembanguan dideklarasikan pertama kali pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan fusi dari empat partai besar Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti.[1] Penggabungan ini merupakan rencana dari Presiden Suharto, dalam rangka penyederhanaan parpol. Pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyerukan perlunya untuk mengelompokkan partai berdasarkan kelompok materi dan kelompok spiritual, selain Golkar. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1970, dilakukanlah konsolidasi dengan berbagai partai politik, yang membahas tentang sikap partai politik dalam menanggapi gagasan dari presiden tentang pengelompokan partai.[2]

Ali Mustopo, yang merupakan salah satu konseptor rekayasa politik Orde Baru, menyatakan bahwa bentuk penyederhanaan partai politik memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek, yakni untuk mempertahankan stabilitas nasional dan pembangunan nasional dalam rangka untuk menghadapi pemilu ditahun berikutnya. Kedua, tujuan jangka panjang, bahwa penyederhanaan partai politik secara konstitusional

---

[1] Masykur Hasyim, *Menusantarakan Politik Islam Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan* (Surabaya, Yayasan Sembilan Lima, 2002), 64.
[2] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU setelah kembali ke Khittah 26* (Jakarta: Erlangga, 1992), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaras dengan Ketetapan No.XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang mengatur ulang struktur politik.[3]

Penyederhanaan ini menghasilkan keputusan, yang awalnya partai politik berjumlah sembilan dan satu Golkar menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok spiritual-material, merupakan perkumpulan partai politik yang dalam melaksanakan programnya meniti beratkan kepada pembangunan spiritual tanpa mengesampingkan pembangunan aspek material. Kedua, material-spiritual, merupakan perkumpulan partai politik yang dalam melakasanakan programnya menitikberatkan pada pembangunan material tanpa mengesampingkan pembangunan aspek spiritual. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok karya, yang menekankan program-programnya pada bidang karya dan kekaryaanya.[4]

Rencana untuk menyederhanakan partai politik mengalami sedikit kendala ketika partai Katolik menyatakan menolak untuk masuk dalam kelompok spiritual, mereka juga mengancam akan membubarkan diri daripada memilih bergabung dengan kelompok spiritual. Pada akhirnya terdapat titik temu, tahun 1970 dibentuklah kelompok nasionalis yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Perkindo dan Partai Katolik yang kemudian diberi nama Demokrasi Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan PDI dan kelompok spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti yang

[3] Ibid., 104.
[4] Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diberi nama kelompok Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).[5]

Peresmian adanya pengelompokan itu menjadi legal setelah dalam MPR hasil pemilu 1971 sudah diputuskan tentang penyederhanaan partai politik, dengan secara tegas dikatakan bahwa hanya ada tiga peserta dalam pemilihan umum 1977 yaitu Fraksi Perasatuan Pembangunan (FPP), Fraksi Demokrasi Pembangunan (FDP) dan Fraksi Karya Pembangunan (FKP).[6]

Pada dasarnya, usaha untuk melanjutkan hubungan dari konfederasi menjadi fusi tidak selalu berjalan mulus dan sesuai rencana, meskipun pada kenyataannya memiliki kesamaan yaitu partai Islam. PSII merupakan salah satu partai yang menolak adanya fusi Partai, PSII yang pada saat itu dipimpin oleh H.M. Ch. Ibrahim, yang merasa bahwa pengelompokan di DPR sudah maksimal jika dalam bentuk konfederasi. Selain itu, alasan yang lain yang membuat PSII menolak fusi partai adalah ketakutan partai PSII, bahwa apabila berfusi dalam satu parpol mereka akan hanya memperoleh posisi inferior mengingat parpol islam lainnya, khusuya Nahdlatul Ulama' lebih mendominasi. PSII tidak akan mendapatkan jabatan penting di pemerintahan. Tetapi hal ini dapat diselesaikan setelah pergantian kepemimpinan PSII oleh H. Anwar Cokroaminoto.[7]

---

[5] Zainal Abiddin, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 158.
[6] Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Sruktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 19890, 174.
[7] Marijan, *Quo Vadis NU*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain, kekhawatiran tesebut juga dimiliki oleh sebagian kader NU, meskipun pada perjalanannya tidak separah PSII yang menimbulkan kepemimpinan tandingan. Pada Muktamar 25 di Surabaya, NU menolak fusi partai Islam menjadi satu partai, dengan alasan bahwa NU akan menjadi minoritas di partai yang akan dibentuk itu. Tetapi setelah melihat perjalan panjang NU selama pemilihan pada masa Orde Baru yang selalu menjadi partai pemenang kedua, akhirnya keputusan tersebut dicabut dan NU mendukung fusi partai sebagaimana yang diinginkan pemerintah.[8]

Tekad untuk berfusi yang tidak mungkin dihindari itu, telah disepakati bersama. Berbagai pertemuan telah diadakan, hingga pada hari Jum'at, 5 Januari 1973 dijadikan sebagai hari jadi PPP. Nama partaipun tidak menjadi permasalahan, walaupaun sebelumnya terdapat beberapa usulan nama partai, seperti Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Perserikatan Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Kemudian dipilihlah H.M.S. Mintaredja sebagai Pimpinan Pusat PPP, yang dipilih secara kekeluargaan.

Pada awal berdirinya, pemikiran NU lebih mendominasi dan mewarnai keputusan-keputusan yang diambil oleh PPP, terutama ketika menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin pada sikap kekritisannya yang sudah ditujukan sebelumnya, terutama pada saat pemilu 1971.[9] Hal dibuktikan dengan tanggapan-tanggapan yang cukup kritis dari pihak PPP pada sidang umum MOR 1973. Selain PPP juga

[8] Ibid., 105.
[9] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguak kebijakan *Floating Miss*, yang dianggap merugikan PPP karena basis terbanyak pemilihnya berada di pedesaan, sehingga dalam hal ini PPP menempatkan posisinya sebagai "Oposisi-loyal" terhadap pemerintah.

Bahasan yang cukup menarik, yang kemudian nanti akan dibahas dalam bab selanjutnya adalah pembahasan mengenai RUU perkawinan, yang diajukan pemerintah ke DPR pada tanggal 31 Juni 1973, mendapatkan pertentangan keras dari masyarakat, termasuk PPP sebagai perwakilan dari aspirasi umat Islam karena RUU ini dianggap bertentangan dengan ajaran agam. Di antaranya adalah meremehkan hukum Islam tentang adanya dua orang saksi yang terdapat pada pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan seorang pencatat perkawinan…". Pada akhinya pemerintah bersama dengan kader-kader PPP yang berada di DPR melakukan perubahan yang cukup mendasar. Kemudian RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974.

NU juga bersikap mengenai RUU perkawinan ini dengan mengadakan musyawarah yang dilakukan di Jombang pada tanggal 22 Agustus 1973. Musyawarah ini atas prakarsa KH. M. Bisyri Syansuri bersama kiai Jombang. Hasilnya adalah NU secara tegas menolak pasal-pasal dalam RUU Perkawinan No1/1973 yang bertentangan dengan hukum Islam dan menyertakan usulan perbaikan (revisi). Hasil keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini kemudian diterima secara aklamasi oleh PBNU kemudian diteruskan oleh Fraksi PPP di DPR.[10]

Meskipun posisi NU mendominasi, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan posisinya di pemerintahan. Pada Kabinet Pembangunan I NU masih dipercaya sebagai duduk di kursi menteri, maka pada Kabinet Pembangunan II tidak ada seorangpun dari NU yang duduk pada posisi Menteri.[11] Jabatan Menteri Agama yang pada kabinet-kabinet sebelumnya NU diberikan kepercayaan, tetapi pada Kabinet Pembanguan II sudah tidak diberikan kepada NU dan pemerintah lebih memilih H. Mukti Ali yang merupakan seorang pemikir pembaharu kampus. Hal ini dapat dipahami karena pemeritahan Orde Baru lebih suka berkoalisi dengan para tenokrat, daripadan kepada politisi non-Gokar. Pada akhinya, politik NU hanya sampai pada lembaga legislatif saja yaitu DPR/MPR.

Strategi yang paling efektif bagi parpol, agar mereka memiliki banyak perwakilan di DPR/MPR yang akan banyak mendukung mereka di Legistaltif yaitu dengan memenangkan dan memperoleh suara sebanyak banyaknya disetiap pemilu umum. NU berupaya dengan mati-matian dalam menyalurkan suaranya pada pemilihan umum tahun 1977 dan 1982, walau pada kenyataanya, tidak terlampau berpengaruh besar dipemilihan umum tahun 1982. Karena justru PPP mengalami penurunan yang awalnya 29,201% pada pemilihan umum tahun 1977 menjadi hanya 27,78% pada

[10] Hafid Maksum, *Wawancara*, Jombang, 27 Maret 2018.
[11] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum 1982.[12] Penurunan ini kemungkinan besar karena adanya desas desus kekecewaan beberapa pihak NU yang kemudian inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya inisitaif agar NU kembali ke khittah dan meninggalkan politik praktis dengan keluar dari PPP.

Awal dari retaknya hubungan NU dengan PPP, sudah terjadi menjelang pemilu 1982, Naro yang merupakan Ketua Umum PPP nekat menyerahkan daftar Calon Legislatif (Caleg) PPP kepada pemerintah, dengan menepatkan 29 Caleng NU pada posisi paling bawah, yang mendapatkan kemungkinan terkecil untuk dipilih, dengan alasan penyingkiran kubu-kubu radikal di PPP. Naro secara psikologi telah melecehkan tokoh-tokoh NU. Protes yang dilakukan oleh NU sama sekali tidak di gubris oleh Naro.[13] Inilah yang kemudian menjadi alasan yang cukup kuat untuk NU kembali ke khittah.

Gagasan untuk kembalinya NU ke khittah sebenarnya sudah di suarakan jauh sebelum NU berfusi ke PPP. Pada muktamar ke 22 di Jakarta tahun 1959.[14] KH. Achyat Chalimi menyuarakan agar NU keluar dari partai politik karena di anggap bahwa partai politik sudah tidak lagi murni karena NU, melainkan karena adanya syahwat-syahwat politik dari beberapa individu yang menginginkan untuk merebut suara dan

---

[12] Ibid., 109.
[13] Bahrul Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi", Jejak langka NU Era Reformasi: menguji Khiitah, Meneropong Paradigma Politik* (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2002), 85.
[14] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendulang suara lewat NU. Namun pada muktamar tersebut gagasan KH. Achyat di tolak oleh sebagian besar peserta Muktamar.[15]

Gagasan untuk kembali ke khittah kembali menyeruak pada Muktamar 25 di Surabaya. KH. Dahlan yang merupakan salah satu aggota presidium kabinat dan Menteri Agama terakhir dari unsur NU, kembali menyuarakan untuk NU kembali ke khittah.[16] Dukungan juga diberikan oleh KH. Wahab Hasbullah yang merupakan Rois 'Aam PBNU pada pidato *iftitach*-nya untuk mengajak para muktamirin agar kembali ke khittah 26. Gagasan ini mendapatkan respon yang cukup banyak dibandingkan dengan gagasan KH. Achyat dengan adanya perdebatan yang cukup sengit untuk mengembalikan NU ke khittah. Namun kehendak para muktamirin untuk tetap mempertahankan NU sebagai partai politik, sehingga gagasan kembali ke khittah tetap ditolak.[17]

Wacana untuk kembalinya NU ke khittah 26, kembali menyeruak pada Muktamar NU ke 26 di Semarang dengan alasan adanya kekecewaan para ulama' terhadap percaturan politik pada saat itu, baik dari kalangan NU sendiri yang menjadikan NU sebagai alat maupun karena dari luar NU, sehingga pada Muktamar ini, mulai terlihat kubu yang menghendaki NU tetap berpolitik dan kubu yang menghendaki NU keluar dari partai politik.[18] Namun pada akhirnya pada Muktamar di Semarang hanya menghasilkan perubahan AD/ART yang awalnya parpol menjadi

[15] Marijan, *Quo Vadis NU*, 135.
[16] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi"*, 87.
[17] Marijan, *Quo Vadis NU*, 134.
[18] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi",* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi masyarakat biasa.[19] Namun pada pelaksanaannya NU tetap berpolitik sebagaimana sebelumnya.

Pada Munas Alim Ulama' di pondok pesantren Salafiyah Safi'iyah Situbondo, wacana untuk kembalinya NU ke khittah kembali menjadi pembahasan utama. Bahkan salah satu dari tiga komisi dinamai dengan komisi khittah, yang membahas tentang landasan perjuangan NU, termasuk pembahasan mengenai asas tunggal dan struktur Organisasi NU. Setelah mengalami perdebatan yang panjang, termasuk sebelum Munas Alim Ulama', dibentuklah Tim Tujuh untuk pemulihan khittah NU, yang kemudian berhasil merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU. Rumusan inilah yang dijadikan bahasan Munas dan Muktamar NU ke 27 di Situbondo yang merumuskan NU untuk kembali ke khittah dan keluar dari partai politik selain itu NU juga menerima Pancasila sebagai Asa Tunggal.[20]

Setelah NU memutuskan untuk kembali ke khittah terdapat banyak peristiwa penting diataranya adalah Penggembosan PPP sebelum pemilihan umum tahun 1987 yang membuat suara PPP merosot tajam dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Di sisi lain PPP yang semakin kecil suara di DPR memberanikan diri untuk mecalonkan Naro sebagai calon wakil presiden yang kemudian memicu ketidak sukaan Presiden Soeharto terhadap Naro, sehingga digantikanlah Naro pada

[19] Marijan, *Quo Vadis NU*, 138.
[20] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi"*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munas PPP tahun 1989 oleh Ismail Metareum yang mampu sedikit mengembalikan suara NU ke PPP.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanan panjang NU mengalami banyak pasang surut dalam menghadapi perpolitikan pada masa orde baru termasuk setelah di fusikannya NU kedalam suatu wadah yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU yang awalnya sangat berpengaruh di PPP tetapi kemudian dengan upaya pemerintah NU semakin dipinggirkan. Dengan adanya kekecewaan itu mulai timbullah NU untuk keluar dari parpol yang kemudian dikenal dengan khittah 26 NU.

Pembahasan yang sangat menarik adalah bagaimana perjalan Partai Persatuan Pembangunan setelah NU memutuskan untuk keluar dari partai politik, karena pada kenyatannya NU merupakan penyumbang terbesar suara PPP. PPP sebagai satu satunya wadah partai politik Islam menjadi sangat menarik untuk dikaji tentang kondisi PPP sebelum terjadinya khittah sampai pada PPP setelah terjadinya khittah dan bagaimana dinamika PPP dan NU, setelah NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926.

Dari pernyataan penulis diatas maka perlu kiranya penulis untuk membuat jawab tentang masalah diatas dengan judul penelitian **"PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PASCA KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926 TAHUN 1984-1994"** yang fokus kajiannya membahasa tentang perjalanan PPP setelah kembalinya NU ke khittah 26, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terfokus pada PPP masa kepemimpinan H. Djailani Naro dan Isma'il Hasan Metareum. Bagaimana dinamika yang terjadi termasuk naik turunya suara PPP pada beberapa Pemilihan Umum di tahun tesebut, sehingga diharapkan dapat memberikan sedikit penjelasan tentang PPP pada masa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk menfokuskan kajian penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan ruang lingkup dalam mengkaji penelitian ini. Ruang lingkup pembahasan penulisan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU ke Khittah 1926 dengan batasan tahun 1984-1994.

Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Sejarah dan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan sebelum kembalinya NU ke khittah 1926?
2. Bagaimana proses dan dinamika antara NU dan PPP untuk menuju khittah 1926?
3. Bagaimana dinamika politik Partai Pesatuan Pembangunan Pasca kembalinya NU khittah 1926?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU ke Khittah 26. Namun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan PPP sebelum khittah NU 1926.
2. Untuk mengetahui bagiamana proses dan dinamika antara NU dan PPP menuju khittah 1926.
3. Untuk mengetahui dinamika politik Partai Persatuan Pembangunan pasca kembalinya NU ke khittah 1926.

D. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan dalam penelitian ini adalah dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah khazanah pengetahuan tentang bagaimana kondisi Partai Persatuan Pembangunan setelah kembalinya NU ke khittah
2. Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat menjadi sebuah refrensi yang membantu dalam penelitain partai politik yang membahas tentang Partai Persatuan Pembangunan termasuk dalam kajian sejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi yang berjudul "Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU ke Khittah 1926 Tahun 1984-1994" menggunakan pendekatan historis dengan perspektif diakronis. Dengan menggunakan pendekatan historis penulis membahas tentang berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang penulisan sejarah tentang PPP yang akan mengungkap peristiwa dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sedangkan secara diakronis dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci suatu gerak dalam waktu dan kejadian-kejadian yang kongkret.[21] Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memaparkan secara jelas tentang peristiwa-perstiwa yang dilalui PPP utamanya setelah kemblinya NU ke khittah 1926.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik, yang merupakan alat untuk menganalisis permasalahan kekuasaan,[22] yang tekait dengan PPP setelah kembalinya NU ke khittah, selain itu mengenai kebijakan kebijakan yang diambil penguasa dalam hal ini penguasa PPP tentang langkah langkah yang diambil setelah kembalinya NU ke khittah.

Teori sebagai pedoman guna mempermudah jalannya penelitian dan sebagai pegangan pokok bagi peneliti. Selain menjadi pedoman, teori juga sebagai sumber inspirasi bagi peneliti dalam memecahkan masalah.

---

[21] Atang Abdul Hakim, *Metodologi Study Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 64.
[22] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Taiara Wacana, 2003), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *Challenge and Response* oleh Arnold J. Toynbee 1889-1975, yaitu teori yang menggambarkan tentang hubungan sebab akibat yang dimuncukan oleh suatu kejadian.[23] Oleh karena itu dengan menggunakan teori ini peneliti mampu menggambarkan tantangan NU ketika berada di tubuh PPP yang awalnya berpengaruh namun kemudian dipinggirkan yang kemudian NU memberikan jawaban untuk kembali ke khittah dan keluar dari PPP. selain itu tantangan PPP setelah NU keluar dari partai politik kemudian PPP memberikan jawabanya yang awalnya mengacuhkan pada masa kepemimpinan Naro dan kemudian setelah kepemipinan Buya Isma'il Metareum NU kembali didekati sehingga ada kepercayaan kembali NU kepada PPP.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang Partai Persatuan Pembangunan sudah banyak yang membahas sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu yang dapat menjadi refrensi tambahan penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suparno (2004) Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dengan judul: " Partai Persatuan pembangunan (PPP) di Indonesia (pembaharuan Politik Pasca Orde Baru tahun 1998-2004)", yang membahas tentang bagaimana proses penerimaan PPP

[23] M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Pancasila sebagai asa tunggal dan perubahan-perubahan yang dilakukan PPP setelah berakhirnya Orde Baru.[24]

2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Sa'adah (2004) Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dengan judul: "Reinterpretasi Khittah 1925: Studi tentang hubungan NU dengan partai partai berbasis NU 1998-2003", yang membahas tentang hubungan NU terhadap partai-partai berlatar belakang NU setelah Reformasi.[25]
3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Eka Setiawan (2016) Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam dengan judul: "Mahbub Djunaidi: Studi pemikiran tentang Khittah Plus NU tahun 1987" yang fokus kajiannya terhadap pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus NU yang tetap mendukung NU sebagai Partai Politik.[26]
4. Skripsi yang ditulis oleh Hambali Rasidi (1999) Mahasiswa Akidah Filsafat dangan Judul: Studi pemikiran pola gerak NU setelah kembali ke Khittah 1926" Skripsi ini membahas tentang gerak-gerak NU dalam percaturan politik setelah kembalinya NU ke Khittah.[27]

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada kondisi Partai Persatuan Pembangunan Pasca kembalinya NU ke khittah 1926, yang membahas dua priode kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan yaitu

[24] Suparno, "Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia (Pembaharuan Politik Pasca Orde Baru Tahun 1998-2004)" (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2004)
[25] Lailatus Sa'adah, "Reinterpretasi Khittah 1925: Study tentang hubungan NU degan partai-partai berbasis NU 1998-2003" (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2004)
[26] Edi Eka Setiawan, "Mahbub Djunaidi: Studi pemikiran tentang Khittah Plus NU tahun 1987" (Skripsi, Fakultas Adab dan Humanioran, 2016)
[27] Hambali Rasidi, "Studi tentang pemikiran NU Pola gerak NU kembali ke Khittah 1926" (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Djailani Naro dan Isma'il Hasan Metareum, apa saja peritiwa-peristiwa yang dilalui dua ketua umum tersebut. Mulai dari pasang surutnya suara sampai pada kiprah dan kekurangan dalam priode tersebut. Dengan melihat dari sudut pandang Partai Persatuan Pembangunan sebagai Parpol yang terpengaruh dengan kembalinya NU ke khittah 1926.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah barang tentu menggunakan metode penelitian sejarah yang mendasarkan pada analisis pada data dan fakta yang ditemui di lapangan, penelitian ini tidak diungkapkan dengan angka-angka sebagaimana penyajian data secara kualitatif. Data yang di dapatkan berupa, dokumen dokumen yang berbentuk tertulis yang berupa AD/ART PPP, Hasil Muktamar NU tahun 1984, UU yang dihasilkan PPP, Majalah yang mebahasa tentang PPP maupun tidak tertulis atau lisan seperti contoh wawancara dengan pengurus PPP, kader-kader yang aktif ditahun 1984-1994.

Adapun langkah-langkah secara prosedur:

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

   Heuristik merupakan bagian operasi pokok dalam historiografi. Dengan mengungkap beberapa dokumen penting tentang judul penelitian, yaitu dengan proses mengumpulkan sumber-sumber, data-data atau jejak sejarah sesuai judul penelitian. Sumber-sumber yang penulis kumpulkan merupakan sumber primer dan skunder. Sumber sejarah bisa berupa dokumen tertulis, *artefak*, maupun sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan.[28] Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokuman, arsip, wawancara dan buku. Sumber tersebut dibagi dua, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data atau sumber kredibel maupun data bukti yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber primer sering disebut juga dengan sumber atau data langsung, seperti: orang, lembaga, struktur organisasi dan lain sebagainya. Dalam sumber lisan yang digunakan sebagai sumber primer adalah wawancara langsung dengan pelaksana peristiwa maupun saksi mata. [29] Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) AD/ART PPP tahun 1977.
2) Hasil Muktamar NU 27 di Situbondo tahun 1984
3) Hasil Pemilihan Umum tahun 1977-1998.
4) Koran Terbitan Tahun 1982-1990 tentang kemelut NU dan PPP.
5) Wawancara kepada KH. Hafid Maksum yang merupakan kader PPP dari NU sejak tahun 1977- sekarang dan pernah mejabat sebagai anggota DPR RI fraksi PPP tahun 1982-1987.
6) Wawancara kepada KH. Masykur Hasyim yang merupakan kader PPP dari NU tahun 1975 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur.

[28] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 94.
[29] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: LOgis Wacana Ilmu, 1999), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Wawancara kepada bapak Husaini Tamrin yang menjabat sebagai pengurus PPP kecamatan Karang Pilang mulai tahun 1975 dan Kader PPP (1975-sekarang).
8) *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Karya Maksoem Machfoedz.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data primer. Bisa dikatakan data sekunder merupakan data pelengkap. Data sekunder adalah data atau sumber yang ditulis berdasarkan sumber pertama. Dalam penelitian ini, data sekunder bisa berupa buku, skripsi atau tulisan yang mendukung penelitian ini, seperti:

1) Hasil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan Islam di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
3) Kacung Marijan, *Quo Vadis NU setelah kembalinya ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).
4) Abdul Aziz, *Politik Islam Politik pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
5) Wawanacara kepada Pak Didik Noerma Zein, selaku Sekertaris Umum DPW PPP Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Skripsi yang ditulis oleh Sabiq Fadloly (1988), yang berjudul Pembaharuan Partai Persatuan Pembangunan setelah menerima Pancasial sebagai asas Tunggal.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik adalah tahapan dimana setelah mendapatkan data-data yang bisa menjadi acuan dalam penelitian ini, penulis memilah-memilah mana data yang sesuai dengan ruang lingkup yang akan dibahas. Pada tahap ini diharapkan agar penulis mendapatkan sumber-sumber yang valid dan relevan dengan tema yang dikaji penulis.

Kritik sumber meilputi kritik interen maupun eksteren. Kritik eksteren untuk menghasilkan tulisan yang memiliki kebernaran isi sumber atau kredibilitas yang tinggi, dilakukan dengan cara membandingkan hasil-hasil tulisan atau informasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, penulis mencoba menelaah ulang tentang sumber primer yang penulis peroleh dan membandingkannya dengan data-data yang lain.

Kritik interen dilakukan untuk mendapatkan sumber yang otentik dengan melihat siapa yang mengatakan atau menulis sumber tersebut. Setelah melakukan kritik eksteren di atas, tentunya penulis melakukan kritik interen untuk menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak.[30] Dengan

[30] G.J. Renier, *Metodologi dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Terj. Muin Umar (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kedua kritik maka penulis dapat mendapatkan sumber sumber yang kuat untuk ditulis.

Dalam tahap ini, penulis mencoba untuk menganalisa secara mendalam terhadap sumber-sumber yang telah di peroleh baik primer maupaun sekunder yang berupa wawancara dengan para kader-kedre PPP pada tahun tersebut ditambah dengan dokumen seperti Hasil Munas, Hasil Muktamar, hasil pemilihan umum maupun dengan buku buku yang ditulis oleh para peneliti pada tahun tersebut maupun masa sekarang, dengan mencocokkannya antara sumber lisan dan tulisan, primer maupun sekunder dengan cara interen maupun eksteren, dengan harapan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibel dan teruji dalam hal keabsahan untuk kemudian dapat dilakukan interpretasi.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya peneliti untik meninjau kembali tentang sumber-sumber yang telah penulis temukan. Dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan atara sumber-sumber yang telah didapatkan. Pada tahapan ini penulis menganalisis dan mengsitensiskan sumber-sumber yang telah didapatkan.

Proses ini dilakuakan oleh penulis yaitu dengan membandingkan antara satu data dengan data yang lain, yaitu hasi wawancara dengan kader-kader PPP pada masa tersebut dengan tulisan ataupun data dokumen yang lain. Hal ini digunakan agar penulis mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil analisa mendalam terhadap permasalahan dan peberdaan informasi antara sumber satu dengan sumber yang lain. Dengan adanya metode ini penulis berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menganalisa data data yang telah di peroleh yang berkaitan tentang Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU ke khittah 26.

4. Historiografi

Tahapan ini adalah penyusuna dari hasil-hasil penafsiran yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk tertulis. Pada tahapan ini, penulis merangkai sumber-sumber yang telah ditafsirkan kemudian disajikan dengan sebaik mungkin sehingga menjadi suatu kisah yang disusun secara sistematis.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis merangkai sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama yaitu tentang sejarah dan perkembangan PPP sebelum kembalinya NU ke khittah 1926. Terdiri dari sub bab latar belakang lahirnya PPP, perkembangan PPP sebelum kembalinya NU ke khittah 1926 dan kondisi politik PPP pada pemilihan umum tahun 1977 dan 1982.

Bab kedua yaitu tentang proses dan dinamika antara NU dengan PPP menuju khittah 1926 yang terdiri dari sub bab latar belakang kembalinya NU ke khittah 26, Dinamika PPP terhadapa NU dalam menuju khittah dan Tokoh Tokoh NU dan PPP dalam Peristiwa khittah 1926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, tentang Dinamika Politik PPP Pasca Kembalinya NU ke khittah 26 (1984-1994). Terdiri dari sub bab PPP pada masa H. Djailani Naro (1984-1989) dan PPP pada masa H. Isma'il Hasan Metareum (1989-1994).

Bab kelima berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab sebelumnya dan juga saran bagi penulis selanjutnya dalam menyempurnakan tulisan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN SEBELUM KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926

A. Latar Belakang Berdirinya PPP

Era demokrasi parlementer[31] berakhir dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959, dan dibentuklah tatanan politik baru dengan bentuk terpimpin yang kemudian disebut sebagai era demokrasi terpimpin.[32] Demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya aliansi antara Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat yang kemudian mempengaruhi jalanya partai-partai politik. Angkatan Darat menjadi sebuah basis politik kuat dengan adanya struktur pemeritahan daerah pada masa keadaan darurat sejak pertengahan tahun 1950. Adanya rentang waktu antara 1950-1959 digunakan oleh Angkatan Darat untuk memperkuat basis politik dan ekonominya, sehingga Angkatan Darat semakin memperoleh ruang gerak dalam urusan politik dan ekonomi negara pada masa demokrasi terpimpin melalui perwakilan fungsional. [33]

Dengan adanya demokrasi terpimpin, terdapat banyak partai politik yang tumbuh dan berkembang dengan cepat salah satunya PKI. PKI

---

[31] Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan, parlemen memiliki memiliki wewenang dalam mengangkat dan menurunkan perdana menteri, Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer. pada tanggal 23 April 2018.

[32] Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 60.

[33] Mohtar Masum, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu partai politik mampu masuk dalam eksekutif dan berubah menjadi aliansi yang sangat diperlukan Soekarno. PKI mendapatkan peluang yang sangat besar untuk memperluas basis politiknya dalam rangka mewujudkan rencana politik yang lebih luas.

Dalam kelompok Islam terdapat dua kekuatan politik yang membuat sikap terhadap sistem demokrasi terpimpin, kelompok Islam pertama menyatakan mendukung dan kelompok kedua menyatakan menolak. Kelompok pertama yang menolak adalah Masyumi, mereka menilai bahwa sistem demokrasi terpimpin akan menjadi sistem yang otoriter. Sistem demikian, menurut pandangan Masyumi merupakan bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam. Kelompok kedua yang terdiri dari NU, Perti dan PSII, menyatakan menerima terhadap sistem demokrasi terpimpin, mereka menilai bahwa menerima sistem ini merupakan sikap yang realistik dan pragmatik.[34] Kelompok Islam yang menyatakan mendukung terhadapa sistem demokrasi terpimpin membuat sebuah "Liga Muslimi" dengan NU sebagai aktor utamanya.

Di lain pihak PKI semakin agresif dengan kelompok yang dianggap sebagai musuh-musuhnya, sehingga sikap akomodatif mereka yang tergabung dalam “Liga Muslimin” mulai memudar.[35] Adanya pencabutan undang-undang darurat pada tahun 1963 oleh Soekarno, direspon oleh PKI dengan memulai strategi baru, yang awalnya dengan jalan damai berganti

[34] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 61.
[35] A. Syafil Maarif, *Islam dimasa Demokrasi Lineral dan Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Prisma, 1988), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tindakan-tindakan radikal dan aksi kekerasan. Tindakan-tidakan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi PKI khusunya organisasi masa mahasiswa diantaranya adalah CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan organisasi kepemudaan, menjadi lebih agresif dalam mengganggu musuh musuhnya, terutama Islam, sehingga pada puncak dari gerakan radikal PKI adalah usaha kudeta yang dilakukan PKI. Peristiwa tersebut kemudian lebih dikenal dengan G-30-S PKI.

Setelah masyarakat Indonesia khususnya Islam melihat berbagai tindakan radikal yang dilakukan oleh PKI, mulailah terjadi berbagai kecaman dan perlawanan yang dilakukan terus menerus terhadap PKI. Perlawanan tersebut terjadi diberbagai daerah dan perlawan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pihak Angkatan Darat, yang membuat PKI semakin tersudutkan dan surut akibat perlawana yang terus menerus.[36]

Semakin turunnya pamor PKI, membuat perimbagan kekuasaan segitiga antara Soekarno, PKI dan Angkatan Darat menjadi goyah, di sisi lain Angkatan Darat semakin kuat, sehingga Soekarno tidak dapat lagi menjadikan PKI sebagai imbangan kekuatan untuk menghadapi Angkatan Darat. Namun karena adanya simpati dari berbagai pihak terhadap Soekarno terutama sayap PNI dan kalangan ABRI yang masih memiliki banyak pengaruh, membuat Angkatan Darat mendapatkan kesulitan dalam

[36] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengahadapi Soekarno, walaupaun Angkatan Darat memiliki dukungan luas dalam menghadapi PKI.

Untuk menghadapi Soekarno yang masih memiliki pengaruh kuat, Angkatan Darat melakukan membuat strategi untuk menekan Soekarno dengan jalan mendorong para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran ketika berlangsungnya sidang kabinet yang dipimpin oleh Soekarno. Dengan berbagai tekanan yang dilakukan oleh rakyat, berhasil dimanfaatkan oleh Angkatan Darat untuk meyakinkan Soekarno agar melakukan limpah mandat, dengan alasan untuk mengendalikan keadaan dan ketertiban. Pada tanggal 11 Maret 1966 turunlah surat perintah dari Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan secara *defacto* kepada Soeharto atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Setelah peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, segeralah Soeharto melakukan tindakan cepat untuk mengumumkan pembubaran PKI dan membersihkan seluruh pejabat-pejabat yang berbau komunis.[37]

Pasca turunnya perintah dari Soekarno, tidak serta merta membuat semua pihak menyepakati pergantian Soekarno, masih ada tarik-menarik antara kubu Angkatan Darat dan kubu yang tetap mendukung Soekarno. Hingga pada tanggal 8 Maret 1968 permasalahan tersebut dibawa ke sidang MPRS, dalam sidang tersebut PNI sebagai pendukung pemerintahan Soekarno bersikukuh untuk mempertahankan Soekarno agar

[37] Purwantana, *Partai Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap menjadi pemegang kekuasaan yang sah, namun NU sebagai salah satu ormas Islam terbesar menuntut untuk pergantian Soekarno.[38] Menghadapi keadaan seperti itu, Jendral Soeharto berusaha untuk mengambil jalan tengah dan bersikap netral hingga dikeluarkannya Tap MPRS No XXXIII/1968, yang bersisi tentang pergantian kekuasaan kepada Soeharto dan secara resmi memberhentikan Soekarno, sehingga ketetapan tersebut menandai selesainya kekuasaan Soekarno sebagai orde lama digantikan dengan kekuasaan baru di bawah pimpinan Soeharto sebagai pemerintahan orde baru.[39]

Krisis politik dan krisis ekonomi yang komplek menjadi latar belakang lahirnya orde baru, dimulai dari percobaan kudeta G-30-S PKI yang memakan korban hampir setengah juta jiwa penduduk kehilangan nyawa ditambah lagi korban dari pihak militer.[40] Dalam militer juga terdapat kelompok kelompok berpotensi meciptakan perang saudara. Pihak Soeharto juga mendapatkan tekanan dari para perwira radikal dalam tubuh Angkatan Darat serta komponen kekuatan politik Islam, yang menginginkan adanya pengadilan terhadap Soekarno, yang apabila tuntutan ini dipenuhi dapat menimbulkan kemarahan dari pihak pendukung Soekarno dan dapat menimbulkan perang saudara. Kondisi perekonomian pada waktu itu berada pada kondisi yang sangat buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya inflasi yang sangat tinggi mencapai

[38] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 71.
[39] Ibid., 72.
[40] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

500% antara tahun 1965-1966,[41] sehingga membuat kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi, terutama kebutuhan pokok berupa beras.

Dalam situasi politik dan ekonomi pada waktu itu, sangat sulit untuk membantah pendapat bahwa ruang lingkup dan intensitas krisis 1965-1966 sangat luas dan mendalam, sehingga dapat digambarkan bahwa siapapun yang memegang kekuasaan tidak akan banyak atau bahkan tidak ada pilihan untuk menanganinya. Dengan adanya krisis seperti itu mendorong Jendral Soeharto untuk menciptakan serangkaian struktur dan praktek politik yang dapat memberikan dukungan bagi transformasi ekonomi dan mampu mengendalikan akibat-akibanya, terutama menjinakkan oposisi dan mencegah agar mereka tidak mengganggu program ekonomi pemerintah.[42]

Berdasarkan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto, membuat beberapa kebijakan untuk kepentingan stabilitas politik, sehigga melahirkan beberapa kebijakan politik Orde Baru terhadap Islam, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Antagonistik (1966-1981) merupakan tindakan yang melihat Islam sebagai ancaman sehingga kekuatan Islam harus dijinakkan. Kekhawatiran orde baru terhadap Islam lebih disebabkan karena adanya ketakutan dijadikannya Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Islam, apabila tidak segera diambil tindakan yang tegas dapat mengakibakan ancaman terhadap pemerintahan Orde Baru. Akibat dari

[41] Ibid., 72.
[42] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap ini, maka partai partai Islam harus difusikan, yang kemudian diberi nama dengan Partai Persatuan Pembangunan yang dimaksudkan untuk lebih mudah dalam mengawasi dan dikendalikan.

2. Resiprokal kritis (1982-1985) yaitu sikap uji coba pemerintahan Orde Baru untuk merangkul umat Islam. sebagai langkah awal dari kemungkinan kerjasama dengan umat Islam. Pemerintahan Orde Baru melakukan tes dengan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi Ormas dan Orpol pada tahun 1985.
3. Akomodatif (1985-1998) yaitu sikap saling memahami dan bekerjasama. Sikap ini diambil setelah melihat umat Islam telah lulus uji, yaitu dengan menerima asas tunggal sebagai satu-satunya asas bagi organisasi masa dan organisasi politik. Dengan adanya kepercayaan tersebut banyak tokoh tokoh Islam menjadi anggota parlemen.[43]

Tekad dari pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk memperbaiki bangsa dengan beberapa kebijakan politik terhadap Islam inilah yang melatar belakangi lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973.

B. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa orde baru lahir di tengah suasana politik yang sedang kacau, sehingga Soeharto selaku Presiden pada masa orde baru berupaya keras untuk memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan selama pemerintahan masa itu. Orde Baru

[43] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk menata dan membina kembali pembangunan dalam bidang politik dan perekonomian nasional.

Dalam usahanya dalam mengembalikan stabilitas negara terutama dalam bidang politik yang memang sangat berpengaruh dengan segala bidang terutama bidang ekonomi, maka Orde Baru membuat proyek politik yang dinamai dengan restrukturisasi politik. Mereka berpandangan bahwa kehancuran ekonomi pada orde lama disebabkan tidak adanya stabilitas politik. Oleh karena itu perlu adanya penyederhanaan struktur kepartaian baik dalam segi jumlah, dukungan, basis masa dan ideologi agar pembangunan dapat berjalan lancar.[44]

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan poyek politik berupa restrukturisasi politik maka ditetapkanlah Tap MPR No.XXII/ MPRS/ 1966 yang berisi tentang pengaturan kembali stuktur politik. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan seruan presiden Soeharto pada tangga 7 Februari 1970 tentang perlunya untuk mengelompokkan partai berdasarkan kelompok material dan kelompok spiritual selain Golkar. Seruan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya konsolidasi dengan berbagai pimpinan parpol pada tanggal 27 Februari 1970, yang membahas tentang tanggapan dan sikap partai menghadapi gagasan tentang pengelompokan partai. [45]

Dalam pertemuan yang diadakan dengan beberapa elit politik, membicarakan tentang rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah

[44] Zainal Abiddin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003), 158.
[45] Marijan, *Quo Vadis NU*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai yang awalnya bejumlah sepuluh kontestan Pemilu menjadi hanya tiga kelompok. Kelompok pertama, terdiri dari partai spiritual-material, yang menitikberatkan pada program-pogram spiritual tetapi tidak mengabaikan material. Kelompok kedua, terdiri dari material-spiritual yang metinikberatkan program-program pada material tanpa mengorbankan spiritual, dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang menitikberatkan programnya pada karya dan kekaryaan.[46]

Rencana pengelompokan partai mengalami sedikit kendala, ketika Partai Katolik Indonesia (Parkindo), menyatakan menolak untuk bergabung dalam kelompok spiritual,[47] hal ini wajar karena hampir sebagian besar kelompok spiritual berasal dari agama Islam dan karena alasan itulah Partai Katolik Indonesia khawatir akan dikucilkan dalam kelompok spiritual. Mereka juga mengancam akan membubarkankan diri daripada harus bergabung dengan kelompok spiritual. Akhirnya setelah melakukan perundingan, terdapat titik temu pada tahun 1970 dibentuklah dua koalisi di DPR, yaitu kelompok Nasionalis yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, Murba dan Parkindo, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok Spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. kelompok Nasionalis diberi nama kelompok Demokrasi Pembangunan dan kelompok spiritual dinamakan dengan kelompok Pembangunan.[48]

---

[46] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 97.
[47] Ibid., 97.
[48] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguatan adanya pengelompokan, dilakukan setelah keluarnya hasil Pemilu 1971 yang mutlak dimenangkan oleh Golkar. Dalam Pemilu tersebut Golkar merupakan partai yang mendapatkan dukungan dari pemerintah baik masyarakat sipil yang bekerja di pemerintahan dan juga disokong suara dari ABRI. Oleh karena itu Golkar mendapatkan suara terbanyak dengan prosentase mencapai 62,8%. Sementara partai Islam meraih prosentase sebesar 29,12%, dengan perincian NU 18,67%, Parmusi 7,365%, PSII 2,30% dan Perti 0,7%,[49] sehingga pemerintah yang awalnya ragu terhadap keputusan tersebut karena khawatir partai politik lain mampu mengungguli Golkar tenyata tidak terbukti. Dengan adanya hasil Pemilu tahun 1971 semakin memantapkan langkah pemerintah dalam menyederhakan partai politik, sehingga penyederhanaan partai tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Pengelompokan partai secara sah setelah adanya pembagian fraksi di DPR sesuai dengan hasil rapat MPR tentang Pemilu tahun 1971, yang menetapkan secara tegas bahwa hanya ada tiga peserta dalam pemilihan umum tahun 1971 yaitu fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang merupakan gabungan dari empat partai besar Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti, fraksi Demokrasi Pembangunan (FDP) yang merupakan gabungan dari partai PNI, Perkindo, Partai Katoilk, IPKI dan Murba, fraksi Kraya Pembangunan (FKP) yang merupakan fraksi dari Partai Golongan Karya.[50]

---

[49] Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,1991), 24.
[50] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun perjalan dalam melakukan fusi partai tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah terutama dikalangan politik Islam, meskipun mempunyai dasar yang sama yaitu Islam akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan dalam menanggapi adanya fusi partai, setidaknya ada tiga pemikiran yang menanggapi adanya fusi partai dikalangan Islam.

Pemikiran pertama datang dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) berdasarkan hasil kongres tahun 1972, M. CH Ibrahim dan Bustaman, secara tegas menolak adanya fusi partai. Mereka mengeluarkan intruksi pada tangga 18 Oktober 1972, yang ditujukan kepada seluruh wilayah dan cabang PSII seluruh Indonesia untuk tidak menghadiri pertemuan yang membahas tentang fusi partai. Adapun wilayah atau cabang yang terlanjur menyetujui fusi, diinstruksikan untuk mengundurkan diri.[51]

Tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan PSII bukan tanpa alasan, mereka berpendapat bahwa pengelompokan di DPR sudah maksimal jika dalam bentuk konfederasi, sehingga tidak perlu adanya perubahan. Selain itu alasan lain yang membuat PSII menolak fusi adalah ketakutan partai PSII, bahwa apabila mereka berfusi dalam satu parpol mereka khawatir hanya akan memperoleh posisi inferior, karena PSII meruapakan partai dengan perolehan suara terkecil kedua setelah Perti. Mengingat juga parpol Islam lainya khususnya Nahdlatul Ulama yang

[51] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan partai dengan perolehan suara kedua terbanyak setelah Golkar akan mendominasai dalam fusi partai tersebut.[52]

Tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan PSII menyulut terjadinya kudeta oleh mereka yang menyebut diri mereka sebagai tim penyelamat PSII yang dilakuakn oleh MA. Ghani, Moh Gobel dan kawan-kawannya. Alasan dalam pengambilalihan tim penyelamat ini karena adanya kekhawatiran bahwa sikap keras yang ditunjukkan oleh para pimpinan PSII mendorong pemerintah untuk membubarkan organisasi politik tersebut. Kemelut yang dihadapi PSII akhirnya mereda setelah dimunculkan sosok H.Anwar Cokroaminoto sebagai ketua yang berusaha untuk mengakomodasi kedua kubu dalam kepengurusannya.[53]

Pemikiran kedua ditunjukkan dari NU, yang menujukkan penolakan fusi yang lebih lunak dan dalam internal NU juga tidak mengalami gejoka yang sebagaimana yang ditunjukkan PSII. Pada awalnya NU tidak menyetujui adanya fusi partai karena bersandar pada hasil muktamar ke 25 yang dilaksanakan di Surabaya. Para pemimpin NU khawatir NU hanya akan menjadi minoritas dalam fusi partai yang akan dibentuk. Padahal NU menduduki posisi kedua setelah Golkar dalam pemilihan umum tahun 1971. Mereka belum sepenuhnya melupakan pengalaman pahit yang dialami ketika bergabung denga partai-partai Islam

[52] Marijan, *Quo Vadis NU*, 104.
[53] Aminudin, *Kekuatan Islam*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Masyumi, yang kemudian dirugikan terutama dalam distribusi-distribusi sumber kekuasaan, seperti posisi Menteri Agama.[54]

Tetapi dalam perkembangannya NU kemudian menerima fusi partai, dengan syarat fusi partai dalam persatuan pembangunan harus tetap berupa federasi seperti halnya ketika bergabung dalam Masyumi pada masa orde lama. Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah setiap parpol Islam tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing dan susunan pimpinan kerja tersebut berdasarkan atas prinsip prinsip mayoriksi menurut pertimbangan di dalam DPR/DPRD.

Respon lainnya juga berasal dari partai lain yang melakukan fusi yaitu Parmusi dan Perti, meraka merespon positif terhadap upaya pemerintah dalam melakukan fusi partai. Penerimaan gagasan fusi partai merupakan pertimbangan yang normatif, dan beranggapan langkah tersebut sebagai upaya untuk memperkuat dan mempererat semangat ukhuwah Islamiyah.[55]

Setelah melalui serangkaian perundingan dan musyawarah, pada tanggal 5 Januari 1973 bertempat di rumah Mintaredja yang berada di Jakarta, berhasil disepakati pendirian Partai Persatuan Pembangunan, dan sekaligus pada hari itu pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Partai Persatuan Pembangunan. Kesepakatan itu ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing kelompok partai di antaranya:

1. KH. Idham Chalid, Ketua Umun PB Nahdlatul Ulama

[54] Ibid., 98.
[55] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. H. Mohammad Safaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Parmusi
3. H. Anwar Cokroaminoto, Ketua Umun PSII
4. H. Rusli Halil, Ketua Umum Perti
5. H. Masykur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di farksi DPR.[56]

Penandatanganan yang dilakukan oleh beberapa elit tokoh partai ini dikenal dengan nama deklarasi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian untuk melanjutkan kompromi terhadap partai Islam yang baru didirikan itu, dilakukan konsolidasi dari unsur-unsur yang berfusi ditandai dengan adanya upaya pengalokasian kekuasaan partai yang berdasarkan pada perimbangan suara yang diperoleh pada pemilihan umum tahun 1971, dan kemudian lebih populer dengan nama "Konsensus 1975". Secara umum NU sebagai partai politik yang memiliki suara terbanyak pada pemilihan umum tahun 1971 di antara partai-partai Islam yang berfusi mandapatkan hak menempatkan tokoh-tokoh NU ke dalam posisi yang bergengsi di PPP, di antaranya adalah KH. Idham Cholid (Ketua PBNU) menjadi Presiden Partai dan KH. Bisri Syamsuri (Rois Syuriah PBNU) menjadi Majelis Syuro Partai. Sementara jabatan eksekutif dipegang oleh HM. Mintaredja dari Parmusi selaku pemenang partai Islam kedua setalah NU.[57]

[56] Tim Media PPP, "Sejarah PPP", dalam, www.ppp.or.id (25 April 2018)
[57] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tentang Susunan Personalitas DPP dan majelis Syuro, tahun 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan Sebelum Kembalinya NU ke Khittah 1926

Meskipun pada awal perkembangannya terdapat berbagi perbedaan pendapat, namun ketika fusi empat partai bergabung menjadi sebuah partai politik dengan bentuk PPP, mereka tetap menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyahnya. Pada tahap awal perekembangan PPP menampakkan ketegasannya dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia dalam politik, hal itu terbukti dalam memperjuangkan aspirasi politik umat Islam yang ditujukan dengan kekompakan para pemimpin politik.

Pada awal dibentuknya fusi partai, pemikiran NU yang merupakan salah satu pemenang kedua pada pemilihan umum tahun 1971 lebih mendominasi dan mewarnai keputusan keputusan yang diambil PPP terutama ketika menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang mendukung atau tidak sesuai dengan agama Islam.[58] Pemikiran itu sebenarnya sudah tampak ketika sebagian pimpinan PPP diambil dari para elit politik NU.

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa NU sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh PPP dalam memperjuangkan aspirasi politik umat Islam di antaranya adalah:

1. Perjuangan NU dalam PPP untuk Menentang Kontroversi RUU Perkawinan

Pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah mengajukan RUU perkawinan, tetapi sebelum rancangan tersebut sampai kepada DPR,

[58] Marijan, *Quo Vadis NU*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar materinya sudah terekspose ke media masa. Dari beberapa rancangan yang sudah menyebar ke berbagai media masa itu kemudian diketahui oleh masyarakat muslim. Tetapi banyak di antara pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah menyeleweng dari ajaran Islam. RUU perkawinan tersebut agaknya merupakan produk yang dikeluarkan oleh orang-orang sekitar Ali Moertopo untuk mendorong sekularisasi politik umat Islam.[59]

Kemudian setelah pemerintah menyampaikan draft RUU perkawinan kepada parlemen, maka reaksi umat Islam muncul, dengan meminta kepada pemerintah agar RUU tersebut ditinjau kembali atau dicabut. Reakasi penting yang dilakukan oleh fraksi Persatuan Pembangunan yaitu meminta kepada para kiai NU di Jombang untuk bermusyawarah dalam menentukan sikap terhadap RUU tersebut, seperti yang dikatakan Hafid Maksum (69 Tahun).

> Kalau dulu ketika ada rumusan undang-undang perkawinan tahun 73 yang banyak menyalahi aturan Islam. PPP pusat meminta bantuan kepada kiai Jombang untuk membahas isi yang ada dalam undang-undang dan memberikan sikap terhadap undang-undang tersebut.[60]

Pada tanggal 22 Agustus 1973 M/ 24 Rajab 1939 H, sebelum memasuki pembicaraan tahap III di DPR. Atas Prakarsa KH. Bisri Syamsuri selaku Rois Syuriah PBNU dan Majelis Syuro PPP dilaksanakanlah musyawarah kiai NU di Jombang yang membahas tentang RUU Perkawinan, diantara kiai yang hadir adalah KH. Adly

[59] Aminudiin, *Kekuasaan Politik*, 100.
[60] Hafid Maksum, *Wawancara*, Jombang, 27 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aly, KH. Saymsuri Badhawi, KH. Mahfud Anwar, KH. Mansur Anwar, KH. Abdul Hadi, KH. Ahmad Ali dan sebagai notulisnya adalah KH. Abdurrahman Wahid dan KH. Abdul Aziz Mansyuri.[61]

Sembilan kiai tersebut kemudian melaksanakan musyawarah di rumah KH. Bisri Syamsuri yang berlangsung hampir setengah hari dimulai dari pagi sampai sore. Hasil dari musyawarah tersebut menyatakan menolak RUU perkawinan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan memberiakan usulan perbaikan dilengkapi dengan dalil-dalil Alquran dan Hadist.[62]

Di antara pasa-pasal dalam RUU yang bertentangan dengan hukum Islam dan dilakukan perbaikan antara lain adalah:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan wali, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan (Pasal 2, ayat 1). Keputusan Musyawarah Jombang berpandangan, dalam pasal ini tidak sesuai mazhab syafii yang menyatakan bahwa rukun dalam melaksanakan pernikahan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Tanpa adanya rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka hukumnya tidak sah.
2. Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan (pasal 11, ayat 2). Keputusan musyawarah kiai NU di

[61] Habib Luqman Hakim, " Perubahan Pasal-pasal dalam RUU Perkawinan NO. 1 Tahun 1973: Study Atas Peran Partisipasi Kiai Nahdlatul Ulama dalam Proses Legislatif Drafting" (Tesis: Program Study Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara, 2015), 60.
[62] Ibid., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang adalah pengahapusan kata agama atau kepercayaan. Karena dalam Islam sendiri sangat melarang adanya pernikahan dengan beda agama seperti yang sudah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221.

3. Bagi janda wanita ditetapkan jangka waktu tunggu 360 hari, kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung dalam hal mana waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak (Pasal 12). Keputusan dari musyawarah kiai Jombang menyebutkan harus adanya perincian dan disesuaikan dalam Alquran.[63]

Hasil dari keputusan musyawarah kiai NU di Denanyar ini selanjutnya diterima secara aklamasi oleh pengurus PBNU di Jakarta. lalu kemudian dilanjutkan kepada Fraksi PP di DPR.[64] Secara otomatis keputusan musyawarah kiai NU ini menjadi pegangan bagi Majelis Syuro PPP dalam Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR.[65] Sikap yang diambil PPP merupakan sikap yang wajar mengingat sejumlah elit NU mendominasi kepengurusan pertama PPP.

Dalam mengahadapi RUU Perkawinan PPP berpegang teguh dengan apa yang telah dimusyawarahkan para ulama Jombang, sehingga pada akhirnya RUU Perkawinan No.1/1973 gagal disahkan dan diganti dengan UU perkawinan yang baru dan tidak bertentangan

[63] Ibid., 62-66.
[64] Ibid., 61.
[65] Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, da Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2009) 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariat Islam yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

2. Perlawanan PPP dalam Sidang Umum MPR 1979

Pengaruh NU dalam pengambilan keputusan juga masih terbukti dengan adanya perlawanan PPP dalam sidang umum MPR 1979. Perlawanan tersebut dipelopori oleh KH. Bisri Syamsuri yang menjabat sebagai Majelis Syuro PPP, dikarenakan hasil sidang umum tersebut menetapkan aliran kepercayaan sejajar dengan agama-agama resmi dengan memasukan dalam GBHN dan mewajibkan indokrinisasi ideologi negara secara masal lewat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Ketetapan ini mengakibatkan banyak kekecewaan di kalangan umat Islam.

Ditolaknya ketetapan tersebut dengan alasan bahwa masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN akan melegalisasi aliran kepercayaan menjadi agama tersendiri yang sejajar dengan agama lain, yang lebih buruk adalah ketetapan ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyebarkan misionaris Kristen di kalangan Islam abangan. Dari sudut pandang KH. Bisri Syamsuri persoalan aliran kepercayaan atau aliran kebatinan ini bertentangan dengan aqidah Islam karena lebih cenderung kepada syirik (perbuatan menyekutukan Allah).[66]

Alasan PPP dalam perlawanan di parlemen mengenai pencantuman P-4 dalam Tap MPR dikarenakan dengan memasukkan P-

[66] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 dalam Tap MPR akan membuat P-4 mempunyai kekuatan sebagai salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia selain Pancasila. Kekhawatiran itu justru akan membuat kebingungan terhadap generasi penerus, apakah mereka akan memilih pedomannya atau Pancasila. P-4 ini juga akan dapat mengaburkan kemurnian Pancasila.[67] Sementara dalam pandangan Islam secara umum adanya P-4 dikhawatirkan dapat mengganti posisi agama dalam kehidupan bermasyarakat.

KH. Bisri Syamsuri berpandangan bahwa keputusan tesebut sebagai ancaman terhadap status Islam sebagai agama sehigga beliau memprotesnya dengan keras.[68] Pendapat yang dikemukakan oleh KH. Bisri yang merupakan salah satu Majelis Syuro PPP sangat berpengaruh dan banyak diikuti oleh sebagian besar kader PPP.

Menghadapi dua permasalahan tersebut FPP secara kompak menolak keputusan tersebut. Setelah FPP melakukan berbagai usaha untuk mufakat mengalami *dead lock,* sementara *scorsing* dan *lobbying* dilakukan berkali-kali tanpa menunjukan hasil yang berarti, maka dilakukanlah *voting.* Melihat kemungkinan *voting* yang tidak mungkin dimenangkan karena adanya perbedaan perwakilan di DPR, akhirnya FPP mengambil tindakan politik dengan jalan *walk out* yang mengisyaratkan bahwa PPP tidak bertanggung jawab terhadap

[67] Ibid., 113-114.
[68] Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Jakarta: LKiS, 2008), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan tesebut.[69] Secara politik, dampak *walk out* sangat merugikan PPP, kemudian Presiden Soeharto beranggapan bahwa FPP adalah kumpulan partai politik Islam yang diisi oleh orang-orang berpemikiran radikal. Mulai saat itulah konflik dalam internal PPP dimunculkan dan pada puncaknya adalah keputusan pergantian ketua umum PPP yang awalnya Mintaredja digantikan dengan Djailani Naro, yang lebih dikenal dengan tangan kanan Presiden Soeharto.

C. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 dan Pemilihan Umum Tahun 1982

Pemilu kedua dalam era orde baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977, dengan UU yang sudah diperbarui yang awalnya UU No 15 tahun 1969 menjadi UU No 4 tahun 1975. Dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam pemilihan umum tahun 1977 berkisar 68 juta jiwa dari total penduduk 114 Juta jiwa. Sesuai dengan keputusan MPR tahu 1971 hanya ada 3 partai peserta dalam pemilihan umum tahun 1977 yaitu partai persatuan pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada pemilihan umum tahun 1977 sebagai ajang pembuktian PPP yang merupakan fusi dari 4 partai besar dan basis kuat pendukungnya berasal dari NU. NU berusaha keras untuk mendulang suara dalam pemilihan umun tahun 1977. Hasil pemilu tahun 1977 hampir tidak berubah, dengan Golkar tetap menjadi mayoritas akibat adanya dukungan

[69] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah dan ABRI, sementara PPP dan PDI menempati posisi berurutan kedua dan ketiga. Berikut merupakan hasil pemilihan umum tahun 1977.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977[70]

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan	18.743.491	99
2.	Partai Golongan Karya	39.750.096	232
3.	Partai Demokrasi Indonesia	5.504.757	29

Sumber: Diambil dari www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id. Diakses tanggal 25/04/2018.

Pemilihan umum tahun 1982, merupakan pemilihan ketiga pada masa pemerintahan orde baru yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 1982. Pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan orde baru memiliki karakter yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki sistem demokrasi pada umumnya. Jika negara demokrasi dibangun atas prinsip yang bebas dan adil dalam prosesnya, namun sebaliknya, Orde Baru menghindari prinsip tersebut, yang kemudian hasilnya adalah ketidak seimbangan antara kontestan pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat.

Disisi lain, PPP mulai mengalami perpecahan akibat campur tangan pemerintah dalam tubuh PPP. NU merasa kecewa terhadap berbagai keputusan yang diambil Djalani Naro yang merupakan Ketua Umum PPP pada saat itu, dengan tetap berusaha untuk mempertahankan suaranya di

[70] Tim Keputakaan Presiden, "Pemilihan Umum Tahun 1977", dalam www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id (25 April 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPP. Namun kekecewaan NU terhadap PPP tetap berpengaruh terhadap perolehan suara PPP pada pemilihan umum tahun1982. Perolehan suara PPP mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah pendaftar Pemilu pada saat itu.

Jumlah penduduk Indonesia pada pemilihan umum tahun 1982 sekitar 146 juta penduduk, dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam pemilihan umum sekitar 82 juta penduduk, dengan rincian suara sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982[71]

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan	20.871.880	94
2.	Partai Golongan Karya	48.334.724	242
3.	Partai Demokrasi Indonesia	5.919.702	24

Sumber: Diambil dari www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id. Diakses tanggal 25/04/2018.

[71] Tim Keputakaan Presiden, "Pemilihan Umum Tahun 1977", dalam www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id (25 April 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSES DAN DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA DENGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENUJU KHTTAH 1926

A. Latar Belakang Kembalinya NU ke Khittah 1926

1. Proses NU menuju Khittah 1926

Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344/31 Januari 1926 di Suarabaya, yang diprakarasai oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Pada awal berdirinya NU merupakan jam'iyah diniyah (keagamaan) karena sebagian besar kegiatannya berfokus pada pengembangan keagamaan, dan tidak bertujuan dalam bidang politik. Tetapi, dikarenakan kondisi pada saat itu, terutama pada masa kolonialisme Belanda menghendaki adanya keterlibatan NU dalam percaturan politik, maka NU tidak bisa menghindari untuk terjun ke panggung politik praktis.

Keikutsertaan NU dalam percaturan politik, sebenarnya karena adanya dorongan dari pemerintah untuk menghimpun semua umat Islam dengan mendirikan MIAI (Majelis Ulama A'la Indonesia), dengan tujuan untuk bekerja sama dan tidak menimbulkan perpecahan diantara perhimpunan umat Islam yang ada. Selain itu MIAI juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan sesama umat Islam baik di dalam maupun di luar negeri.

Keterlibatan NU dalam dunia politik semakin jelas setelah berdirinya Masyumi menggantikan MIAI yang dianggap sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai lagi oleh pemerintahan Jepang. Pada tanggal 07 November 1945, Masyumi meresmikan diri sebagai partai yang memiliki tujuan sebagai partai pemersatu umat Islam. keterlibatan NU dalam Masyumi sebagai partai politik menandai keikutsertaan NU dalam politik praktis sejak Indonesia menjadi negara merdeka.

Namun kedudukan NU dalam Masyumi tidak bertahan lama, kekecewaan NU terhadap Masyumi dikarenakan adanya pengurangan porsi kebijakan dewan syuro yang awalnya sebagai penentu kebijakan partai menjadi hanya sebagai badan penasehat.[72] Selain itu departemen agama yang merupakan satu-satunya badan pemerintah yang seharusnya menjadi hak NU, tidak lagi diberikan kepada NU.[73] Akhirnya pada muktamar NU ke-19 di Pelembang tahun 1952, NU memutuskan untuk keluar dari partai Masyumi dan memutuskan untuk menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Perubahan NU yang awalnya merupakan jam'iyah keagamaan menjadi partai politik, tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari semua warga NU. Ini dibuktikan ketika pengambilan keputusan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri tidak menemukan kesepakatan bulat, hingga akhirnya pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau *voting*.

Dari hasil pemungutan suara tersebut, sudah tergambarkan kondisi NU pada saat itu. Terdapat tiga kelompok dalam tubuh NU yang

[72] Bruinessen, *NU: Tradisi*, 62.
[73] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggapi perubahan NU yang awalnya jam'iyah menjadi partai politik. Ketiga kelompok tersebut adalah

a. Kelompok pertama adalah kelompok yang tetap mendukung agar NU tetap berkecimpung dalam politik praktis. Kelompok ini beranggapan bahwa, dengan NU tetap berpolitik maka NU dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR.
b. Kelompok kedua adalah kelompok yang masih berpijak pada tujuan NU semula, yakni sebagai jam'iyah diniyah. Kelompok ini cenderung pada pembinaan umat, tanpa mempedulikan kedudukannya, sehingga kelompok ini tidak setuju jika NU terjun dalam percaturan politik praktis. Mereka berpendapat bahwa jabatan hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan. Kelompok inilah yang nantinya mempelopori kembalinya NU ke khittah 1926
c. Kelompok ketiga adalah kelompok yang berada diantara kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok ini masih setuju apabila NU tetap terjun dalam dunia politik, tetapi tidak melupakan pembinaan terhadap umat, karena itu merupakan tujuan utama. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan berpolitik NU mampu menyampaikan aspirasi dan kebijaksanaan pemerintah terhadap umat.[74]

Munculnya kelompok-kelompok tersebut memang tidak ditunjukan secara jelas ke permukaan, namun tidak menutup kemungkinan apabila di

[74] Maksoem Makfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya:Yayasan kesatuan Ummat, 1982), 237-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telusuri dari awal pendirian NU sebagai partai politik, maka kelompok kelompok bukan tidak mungkin dapat terbentuk.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah NU diputuskan masuk ke dalam dunia politik praktis secara independen, muncullah beberapa pandangan bahwa NU dianggap telah keluar jauh dari rel yang seharusnya. Oleh karena itu, gagasan untuk kembali ke khittah mulai dimunculkan oleh kelompok kedua. Gagasan kembali ke khittah mulai dimunculkan jauh sebelum NU berfusi ke PPP yang digulirkan oleh tokoh-tokoh NU. Pada muktamar ke-22 yang dilaksanakan di Jakarta, 13-18 Desember 1959.[75] KH. Achyat Chalimi selaku juru bicara PCNU cabang Mojokerto menyampaikan gagasan untuk kembali ke khittah, pada saat pandangan umum dari berbagai cabang memasuki hari ketiga yang dipimpin oleh KH. Ahmad Syaichu[76]. Gagasan yang dilontarkan oleh KH. Achyat Chalimi dianggap aneh karena pada saat itu *euforia* NU menjadi partai politik sedang memuncak, dikarenakan NU menempati posisi ketiga pada pemilihan umum tahun 1955 yang merupakan pencapaian gemilang NU sebagai partai politik yang tergolong baru.

Gagasan untuk kembalinya NU ke khittah, didasari dengan pertimbangan bahwa selama ini NU sudah terlalu mengedepankan urusan politik, karena pada kenyataanya bukan semata-mata lagi mengutamakan kepentingan organisasi tetapi hanya mengutamakan kepentingan pribadi,

---

[75] Bahrul Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi"*, 87

[76] Ahmad Syaichu merupakan salah satu ulama yang dilhairkan di Surabaya tanggal 29 Juni 1921, beliau juga termasuk salah satu murid dari KH. Wahab Chasbullah. Wahab Karim, "KH. Ahmad Syichu dari ranting NU sampai Presinen", dalam ttp://www.nu.or.id/post/read/63797/kh-achmad-syaichu-dari-ranting-nu-sampai-presiden-oiaa (17 Juni 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada urusan keagamaan yang sebenarnya menjadi tujuan utama NU pada awal berdirinya.[77] Mereka para politisi NU sudah tidak lagi berjuang murni karena NU, melainkan karena syahwat-syahwat politik yang menginginkan untuk merebut suara dan mendulang suara lewat NU.

Tanggapan terhadap gagasan KH. Achyat, muncul dari berbagai pihak. Sebagian besar peserta muktamar menentang gagasan tersebut, hanya ada perwakilan dari PCNU cabang Ngawi yang mendukungnya. Juru bicara PCNU cabang Pandegelang, KH. Abdullah Mu'thi dalam tanggapanya mengatakan bahwa NU tidak harus kembali ke khittah 1926 walaupun negara sudah kembali ke UUD 1945. Dari pihak PBNU yang diwakili oleh KH. Idham Chalid yang merupakan pendukung NU tetap berpolitik berpendapat bahwa, NU hanya perlu kembali kepada semangat dan jiwa *ta'abbudiyah* tahun 1926, tetapi dalam perjuangannya kita tetap berjuang di tahun 1959 yaitu dengan berpolitik.[78]

Gagasan kembali ke khittah kembali menyeruak pada muktamar NU ke 25 di Surabaya tahun 1971. Gagasan tersebut disampaikan oleh KH. Dahlan yang merupakan salah satu anggota presidium kabinet dan Menteri Agama terakhir dari unsur NU. KH. Dahlan juga merupakan salah seorang yang terlibat dalam kelahiran orde baru, dan mengetahui

[77] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembalinya NU ke Khittah 26* (Jakarta: Erlangga, 1992), 132
[78] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan stuktur politik orde baru.[79]

Dukungan atas gagasan yang sampaikan oleh KH. Dahlan juga di dukung oleh Rois 'Aam PBNU yang merupakan salah satu pendiri NU yaitu KH. Wahab Hasbulllah, dalam pidato *iftitah*-nya yang juga dalam muktamar NU ke 25. Beliau mengajak para muktamirin untuk kembali kepada khittah 1926. kiai Wahab menyampaikan perdapatnya, seperti yang ditulis oleh Kacung Marijan, bahwa:

> Kaum Nahdhiyyin-Nahdhiyyat agar kembali kepada Nahdlatul Ulama' tahun 1926. Tentulah yang dimaksud bahwa sekalipun kita berjuang di tahun 1971, namun kita harus tetap berjiwa NU tahun 1926. Kita akan tetap selamanya setia kepada Aqidah dan Himmah Ahlussunah Wal Jama'ah.[80]

Pidato yang disampaikan oleh KH. Wahab Hasbullah yang juga menguatkan gagasan dari KH. Dahlan memperoleh sambutan yang lebih banyak, jika dibandingkan gagasan yang disampaikan KH. Achyat. Sambutan yang baik diberikan oleh muktamirin, dibuktikan dengan adanya pembahasan mengenai kembalinya NU ke khittah yang diperdebatkan dengan cukup sengit. Tetapi kehendak muktamirin yang menginginkan agar NU tetap berpolitik praktis jauh lebih besar, sehingga keinginan sebagian kalangan agar NU kembali ke khittah masih belum terwujudkan.[81]

---

[79] Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 47.
[80] Marijan, *Quo Vadis NU*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gelombang gagasan yang menginginkan agar NU kembali ke khittah menyeruak kembali dalam muktamar NU ke 26 di Semarang, 05-11 Juni 1979. Pemikiran untuk menjadikan NU kembali kepada jam'iyah diniyah sebagaimana awal berdirinya tahun 1926, didasarkan karena kekecewaan tokoh NU terhadap percaturan politik, yang membuat NU semakin terpinggirkan, ditambah lagi kekecewaan terhadap politisi NU, yang hanya menjadikan NU sebagai alat untuk mendulang suara tanpa ada keseriusan untuk memperjuangkan aspirasi politik NU di PPP.[82]

Arus gagasan agar NU kembali ke khittah 1926 makin menguat dengan adanya program dasar pengembangan lima tahun NU yang digagas pada muktamar 26 di Semarang, sebagai keputusan muktamar tersebut, yang bertujuan sebagai berikut:

a. Menghayati makna seruan kembali ke jiwa 1926
b. Memantapkan upaya internal untuk memenuhi seruan tersebut
c. Memantapkan cakupan partisipasi Nahdlatul Ulama secara lebih nyata dalam pembangunan bangsa.[83]

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keputusan muktamar NU ke 26 di Semarang, hanya mampu mengembalikan NU sebagai organisasi keagamaan secara konseptual, namun gagal dalam hal operasional. Semangat untuk kembali menjadi organisasi keagamaan memang dinyatakan dalam keputusan muktamar, tetapi langkah realistis untuk membenahi khittah itu tidak dibenahi. Hal ini juga disebabkan karena

[82] Ulum, "*Bodohnya NU" atau "NU Dibidohi*", 88.
[83] PBNU, Program Dasar Pembangunan Lima Tahun Nahdlatul Ulama: Keputusan Muktamar NU ke 26., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya pimpinan NU yang juga merangkap menjadi pimpinan partai PPP dan tidak dapat lepas dari partai politik.

Setelah adanya pelaksanaan muktamar NU di Semarang, semakin terlihat pandangan berbagai kelompok dalam menyikapi keluarnya NU dari politik praktis dan kembali ke khittah seperti yang sudah disebutkan diatas, kelompok tersebut yaitu:

a. Kelompok yang menghendaki NU berpolitik adalah KH. Idham Chalid, KH. Chalid Mawardi, KH. Anwar Musaddad dan para pendukung lainnya.
b. Kelompok Non Politik adalah KH. Ahmad Shiddiq, KH. Ali Maksum, KH As'ad Samsul Arifin dan lain-lain.
c. Kelompok yang berada diantara keduanya yaitu KH. Yusuf Hasyim dan para pendukungnya.[84]

Hasil yang ditetapkan pada muktamar NU ke 26 di Semarang dirasa belum memuaskan, sehingga gagasan NU kembali ke khittah kembali digulirkan pada munas *alim ulama'* di pondok pesantrena Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Pada munas tersebut wacana kembali ke khittah justru menjadi agenda utama. Bahkan dalam munas ini khittah menjadi salah satu komisi yang diberi nama dengan komisi khittah, yang bertujuan untuk membahas tentang landasan perjuangan NU, juga didalamnya membahas tentang asas tunggal dan struktur organisasi NU.[85]

---

[84] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU dibodohi"*, 89.
[85] Marijan, *Quo Vadis NU*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam perjalananya terdapat pro dan kontra mengenai kembalinya NU ke khittah 1926, namun usaha terus dilakukan oleh kelompok intelektual muda NU dengan terus mengadakan komunikasi yang intensif dengan tokoh-tokoh pesantren. Pada 12 Mei 1983, kelompok tersebut berkumpul di Jakarta untuk membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk membahas materi pemulihan khittah. Tim ini kemudian diberi nama dengan "Tim Tujuh".[86]

Tim tersebut terdiri dari Abdurrahman Wahid (ketua), H.M. Zamroni (wakil ketua), Said Budairy (sekretaris), Mahbub Junaidi, Fahmi Syaifuddin, Daniel Tanjung dan Ahmad Bagja (anggota), dengan tujuan untuk merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU sesuai khittah 1926, serta menyusun ulang kepemimpinan NU.

Rumusan yang dihasilkan oleh tim tujuh inilah kemudian dijadiakan bahan Munas *alim ulama'* tahun 1983 dan muktamar NU ke-27 di Situbondo. Adapun garis besar dan ide dasar perjuangan NU, dirumuskan sebagai khittah Nahdlatul Ulama' dalam muktamar NU yang kemudian didefinisikan bahwa:

a. Khittah Nahdlatul Ulama' adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

[86] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU dibodohi"*, , 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan tersebut dalam paham Ahlussunah Wal Jama'ah yang di tetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan.

c. Khittah Nahdlatul Ulama' juga digali dari rintisan perjalanan sejarah kekhidmahanya dari masa ke masa.[87]

Setelah adanya ketetapan bahwa NU telah kembali ke khittah 1926, maka secara resmi NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan secara organisatoris keluar dari PPP. Anggota NU dibebaskan dalam memilih partai apapun asalkan didasari dengan *akhlakul karimah*.

2. Faktor-faktor Penyebab kembalinya NU ke Khittah

Tetapi dibalik proses kembalinya NU ke khittah 1926 yang begitu panjang, terdapat beberapa faktor pokok yang menyebabkan NU yakin untuk kembali ke khittah, baik yang bersumber dari eksteren yakni pertentangan dengan PPP maupun yang bersumber dari interen atau dari dalam NU sendiri.

a. Faktor Penyebab Eksteren kembalinya NU ke Khittah

NU kembali ke khittah 1926, tidak dapat dipungkiri memiliki faktor penyebab eksteren yang dimaksud disini adalah penyebab dari luar dalam hal ini adalah konflik yang terjadi di dalam tubuh PPP dan NU yang merupakan salah satu dari unsur penting dalam berdirinya PPP, sehingga hal inilah yang ikut andil dalam mendorong NU kembali ke khittah 1926.

[87] Ibid., 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keretakan hubungan NU dengan PPP, diawali dengan ketidak seragaman suara PPP terhadap RUU Pemilu yang dibahas di DPR-RI. Pembahasan RUU tersebut mengalami perdebatan yang cukup panjang hingga memakan waktu hampir setengah tahun.[88] Perdebatan itu dikarenakan tidak adanya kata sepakat dari unsur NU terhadap RUU Pemilu. Kemudian H.J. Naro yang merupakan ketua umum PPP mengadakan rapat pada tanggal 25 Februari 1980 yang bertempat di rumahnya untuk membahas RUU Pemilu. Kemudian berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa PPP menerima RUU Pemilu, meskipun pada kenyataannya rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota DPP-PPP terutama dari kalangan NU.[89]

Melihat tindakan dari Naro yang bersikap otoriter, maka PBNU juga mengadakan rapat yang bertempat di kantor PBNU untuk membahas tentang sikap yang akan diambil dalam menghadapi sidang pleno DPR pada tanggal 29 Februari 1980 yang akan membahas kesepakatan RUU pemilu. Karena tidak menemuki kata sepakat maka pihak NU memutuskan untuk melakukan "walk-out" dalam sidang tersebut apabila RUU tersebut tetap disahkan.

Perbedaan pendapat ini membuat fraksi PPP yang ada di DPR terpecah. Masing-masing kelompok bersikukuh dengan pendapat mereka. Satu kelompok menyatakan menerima dan kelompok lain dalam hal ini NU tidak menyetujui materi RUU. Namun pada akhirnya

[88] Slamet Effendy, etal, *Dinamika Kaum Santri* (Jakarta: Rajawali, 1983), 64
[89] Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan bangkitnya Ulama*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU tersebut tetap disetujui secara aklamasi meskipun tanpa kehadiran NU dalam mengambil keputusan.

Keretakan ini kemudian merembet ke soal kekuasaan. Pertikaian itu dimulai ketika DPR-RI mengadakan pemilihan pimpinan komisi VII (Perdagangan, Keuangan dan Bank Sentral). Pada pemilihan tersebut NU menginginkan jabatan tersebut agar diserahkan kembali kepada NU karena itu menjadi haknya jika dilihat dari ”konsensus 75”, karena sebelumnya jabatan tersebut dijabat oleh Moeljomiseno (NU) yang kemudian dipinjamkan pada persidangan 1979/1980 kepada Soedarji dari Partai Muslimin Indonesia (MI). Namu Sudarji menolak untuk mengembalikan jabatan itu sehingga membuat NU kecewa. Perebutan jabatan ini kemudian meluas ke semua komisi dan badan kelengkapan DPR lainnya yang menjadi jatah PPP.[90]

Perselisihan muncul kembali menjelang pemilu 1982. Soedarji, selaku perwakilan dari MI meminta perimbangan perwakilan di DPR. Soedarji berpendapat bahwa Musyawarah Nasional Dewan Partai tahun 1975 atau yang lebih dikenal dengan ”Konsensus 75” sudah tidak relevan lagi dengan keadaan MI sekarang.

Belum selesai aksi yang dilakukan Soedarji, muncul kembali aksi baru yang dilakukan oleh ketua umum DPP-PPP yaitu H.J. Naro yang juga kader MI. Pada tanggal 27 Okteber 1981 H.J. Naro mengumumkan secara sepihak daftar calon sementara anggota DPR

[90] Marijan, *Quo Vadis NU*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Menteri Dalam Negeri. Daftar calon yang diumumkan Naro membuat banyak kader NU kecewa, karena calon tersebut tidak melalui persetujuan dari NU. Selain itu banyak dari kader NU yang dianggap radikal terhadap terhadap pemerintah mulai dilempar dari daftar calon.

Daftar calon sementara yang diumunkan Naro tersebut, kemudian diprotes oleh NU yang ditujukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU), melalui pernyataan yang disampaikan oleh Rois 'Aam KH. Ali Maksum, Presiden Partai KH. Idham Chalid dan Sekjen H.M. Munasri.[91] NU juga meminta agar DPP-PPP secepatnya menyelenggarakan rapat untuk membicarakan masalah tersebut. Namun pernyataan dari NU tidak ditanggapai oleh ketua umum DPP-PPP. Ini menunjukan bahwa ketua umum DPP-PPP H.J. Naro tidak ada upaya untuk menuntaskan masalah ini, sehingga permasalahan tersebut berlarut-larut.

Kondisi dalam tubuh partai semakin lama kurang menguntungkan NU. Pimpinan NU juga beranggapan bahwa bahwa NU tidak mendapatkan keuntungan menjadi anggota partai PPP. Apalagi, setelah banyak dari tingkah laku pimpinan PPP tidak mementingkan kesepakatan bersama atau kesepakatan musyawarah mufakat. Ini terbukti dengan banyaknya keputusan penting yang diputsukan oleh pimpinan PPP diputuskan tanpa melalui musyawarah dengan pimpinan PPP dari NU, ditambah lagi banyak keputusan yang dianggap

[91] Effendy, *Dinamika Kaum Santri*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan NU. Hal ini kemudian direspon oleh KH. Saifuddin Zuhri yang merupakan salah satu wakil ketua DPP, mengajukan surat pengunduran dirinya dari PPP.

Puncak dari kekecewaan NU yang membuat NU semakin mantap untuk keluar dari partai politik adalah pada saat muktamar pertama PPP 20-22 Agustus 1984 di Jakarta. Ketika muktamar akan dilaksanakan, hampir semua tokoh NU yang ada PPP tidak diikut sertakan dalam kegiatan muktamar, selain itu juga banyak dari kader NU yang ada di PPP dikeluarkan dari jabatan sebagai pimpinan PPP. Inilah yang kemudian menjadi puncak dari kemarahan NU kepada PPP.[92]

Pada akhirnya dengan adanya masalah eksteren yang berkaitan dengan PPP, mendatangkan semacam kemantapan agar dikalangan pimpinan NU membuat kebijakan agar NU memisahkan diri dari PPP. Selain adanya konflik yang terjadi dengan PPP, salah satu penyebab lain adalah besarnya keinginan dari warga NU agar NU kembali ke khittah 1926, dengan tidak lagi berkecimpung di dunia politik praktis tetapi fokus kepada jam'iyah diniyah seperti pada saat pertama mereka dididrikan.

b. Faktor Penyebab Interen kembalinya NU ke Khittah

Sebab-sebab yang dimaksudkan disini adalah penyebab yang berasal dari dalam tubuh NU sendiri, baik karena kepemimpinan yang

[92] Soleh Hidayah, "NU Setelah kembalinya ke Khittah 1926", (Skripsi: Fakutas Adab dan Humaniora , 1989), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai rapuh sampai pada akibat lamanya NU berkecimpung didalam dunia politik praktis bersama PPP. Pada akhirnya membawa dampak yang cukup besar dalam pengaruhnya untuk kembali ke jam'iyah diniyah.

Kondisi NU menjelang muktamar ke 27 di Situbondo Jawa Timur sebagai salah satu penyebab kembalinya NU ke khittah 1926. Kondisi tersebut diantaranya adalah adanya dualitas dalam pucuk kepemimpinan NU ditambah lagi lambatnya respon pimpinan NU dalam menaggapi konflik antara NU dan PPP.

Dualitas kepemimpinan NU ini dibuktikan dengan adanya persaingan pengaruh antara dua kewenangan yaitu syuriah dan tanfidziyah. tetapi jika melihat dari AD/ART NU, bahwa kewenangan syuriah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanfidziyah, karena syuriah mempunyai kewenangan untuk membina, membimbing mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi oleh sebab itu sebagian besar pengurus syuriah adalah para kiai sepuh NU, sedangkan kewenangan tanfidziyah adalah sebagai pelaksana dari seluruh keputusan dan kebijakan syuriah.[93]

Dominasi tanfidziyah terhadap syuriah, dimulai sejak kepemimpinan Mahfud Shiddiq yang pada saat itu menjabat sebagai ketua tanfidziyah. Mahfud Shiddiq memberikan peran lebih besar kepada tanfidziyah, sehingga mengambil ranah yang seharusnya

[93] Andree Feillard, *Nu Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kewenangan para kiai (syuriah). Selain itu, salah satu sebab utama menonjolnya peran tanfidziyah dimulai sejak keterlibatan langsung NU dalam kegiatan politik praktis. Ini terjadi dikarenakan munculnya tokoh tokoh muda NU, yang memiliki ide-ide dalam berpolitik dalam melangkah tanpa mengindahkan masukan-masukan dari tanfidziyah.[94]

Naiknya pamor tanfidziyah, tentu saja membawa pengaruh kurang baik dalam organisasi maupun dari pihak luar. Pengaruh kurang baik dari dalam organisasi NU adalah banyak anggota yang bingung terhadap kewenangan-kewenangan dan batasan-batasan yang dimiliki oleh dua unsur pimpinan tersebut (syuriah dan tanfidziyah), sedangkan pengaruh dari luar adalah sulitnya membedakan mana yang lebih berpengaruh dari keduanya.

Usaha yang dilakukan oleh tanfidziyah, agar setiap tindakan yang dilakukan oleh tanfidziyah tidak mendapatkan halangan lagi dari syuriah, yaitu salah satunya adalah dengan mengurangi ketergantungan dengan ulama'. Usaha ini dilakukan karena Rois 'Aam Syuriah mempunyai hak *veto* untuk menghentikan tanfidziyah apabila dianggap sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

Usaha Tanfidziyah, berlanjut ketika munas *alim ulama'* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus – 2 September 1982 di Kaliurang. KH. Idham Chalid selaku ketua Tanfidziyah berusaha

[94] Marijan, *Quo Vadis NU*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan pengaruhnya, salah satu upayanya adalah berusaha untuk mengangkat KH. Anwar Musaddad menjadi Rois 'Aam Syuriah dikarenakan wafatnya KH. Bisri Syamsuri selaku Rois 'Aam PBNU sebelumnya. Upaya ini dilakukan KH. Idham Chalid karena KH. Anwar Musaddad adalah salah salah satu ulama' yang mendukung NU tetap berpolitik, sehingga dapat dipastikan upaya ini adalah untuk memperkokoh posisinya sebagai ketua PBNU.

Jika dilihat dari struktural organisasi, maka yang lebih berhak untuk menduduki posisi Rois 'Aam PBNU adalah KH. Anwar Musaddad, karena beliau merupakan wakil Rois Syuriah, maka seharusnya secara otomatis jabatan tersebut jatuh kepadanya sampai muktamar NU selanjutnya.[95] Tetapi karena sebagian besar para ulama tidak setuju, maka dibahaslah masalah tersebut di Munas, dan dipilihlah KH. Ali Maksum yang merupakan pengasuh pesantren Krapyak Yogyakarta sebagai Rois 'Aam PBNU menggantikan KH. Bisri Syamsuri atas usulan KH. Ahmad Shiddiq.

Selain masalah di atas, salah satu masalah internal yang dihadapi NU adalah lambatnya respon yang dilakukan pimpinan NU dalam menghadapi konflik yang ada di PPP seperti sikap politik KH. Idham Chalid dalam menanggapi konflik antara NU dan PPP. Kekecewaan warga NU kepada KH. Idham Chalid selaku ketua tanfidziyah dan presiden partai PPP, semakin memuncak ketika

[95] Patmono, "NU tidak bisa lepas dari partai politik", Jawa Pos (Rabu14 Desember 1883), 1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan daftar calon anggota DPR yang sangat merugikan NU. Menanggapi sikap tersebut, warga NU yang berharap ada tindakan dari KH. Idham Chalid sebagai penengah guna menjernihkan masalah tersebut. Justru yang dilakukan KH. Idham Chalid hanya memilih untuk tidak mengambil tindakan bahkan bungkam.[96]

Sikap ketua umum PBNU tersebut, menjadi tanda tanya dan spekulasi, baik dikalangan NU maupun PPP. Sikap yang kurang tegas dan tetap diam, dianggap telah menyalahi etika seorang pemimpin yang memegang pucuk pimpinan, sehingga wajar jika banyak diantara warga NU yang menginginkan agar KH. Idham Chalid diganti. Alasan kuat penggantian ini, dianggap karena KH. Idham Chalid tidak mampu membedakan kepentingan mana yang harus didahulukan sebagai salah satu kader dari NU yang menjadi salah satu pondasi dalam PPP.

Melihat kondisi tersebut, ditambah dengan sikap dari KH. Idham Chalid yang tidak dapat diharapkan lagi, maka PBNU syuriah mengadakan rapat, untuk menjaga agar konflik tersebut tidak meluas. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan tanfidziyah yaitu HM. Yusuf Hasyim (ketua I), Mahbub Djunaidi (ketua II), dan Drs. Chalik Ali (bendaraha) yang di laksanakan pada tanggal 29 Januari 1982 di langgar KH. Masykur yang berada di Jl Imam Bonjol no 22, Jakarta. Hasil dari rapat tersebut salah satu isinya adalah mempertimbangkan

[96] Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan bangkitnya Ulama*, 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi NU dalam PPP, apabila asas musyawarah, solidaritas internal dan asas organisasi tidak dapat ditegakkan.

Namun keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh tanfidziyah, khususnya dikalangan politisi NU yang memang menghendaki NU tetap berpolitik. Chalid Mawardi sebagai seorang politisi yang tetap menginginkan NU dalam PPP, beranggapan bahwa keputusan di rapat PB syuriah bukan sepenuhnya keinginan NU melainkan hanya merupakan ekspresi para ulama, yang menginginkan agar PPP lebih terbuka dan demokratis. KH. Idham Chalid yang merasa sebagai ketua tanfiziyah tetapi tidak menghadiri dan diundang dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan bukan mewakili tanfidziyah dan pimpinan wilayah. Hal ini semakin terlihat bahwa antara syuriah dan tanfidziyah berjalan sendiri-sendiri tanpa dapat dikandalikan lagi.

Perpecahan dalam tubuh NU, menurut penulis dikarenakan Rois ‘Aam yang kurang memenuhi persyaratan dan ketidak tegasan KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU. Kapasitas KH. Ali Maksum sebagai Rois ‘Aam dinilai berada jauh dibawah pendahulunya, sehingga antara keduanya terdapat ketidak percayaan dan saling meragukan. Inilah yang kemudian membuat seakan-akan antara syuriah dan tanfidziyah berjalan sendiri-sendiri dan tidak pernah mendapatkan titik temu. Beberapa sebab diatas merupakan salah satu penyebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting kembalinya NU ke khittah jika dilihat dari sebab-sebab internal yang ada di dalam tubuh NU.

B. Dinamika PPP dan NU Dalam Menuju Khittah 1926

Proses dalam menuju khittah NU 1926, memang sangat panjang seperti yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik itu semua terdapat proses tarik menarik antara PPP dan NU dalam rangka menuju khittah 1926. PPP yang dalam hal ini membutuhkan suara NU akan sangat dirugikan apabila NU melepaskan dari partai politik dan menarik suara dari PPP, selain itu upaya NU agar keluar dari PPP dan kembali menjadi jam'iyah diniyah dengan salah satunya memberikan peraturan agar setiap pengurus NU tidak merangkap dengan pengurus partai juga menjadi senjata yang juga merugikan NU karena nantinya NU tidak punya suara di pemerintah untuk menyuarakan aspirasinya lewat DPR.

KH. Yusuf Hasyim yang dalam hal ini mewakili sebagai ketua I PBNU dan salah satu tokoh yang kecewa terhadap PPP, menyatakan bahwa NU sebagai jam'iyah diikuti oleh banyak anggota yang mengikuti berbagai organisasi maupun parapol seperti Golkar (Golongan Karya), Guppi (Gabungan Uasaha Pembaharuan Pendidikan Islam), MDI (Majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah Islamiyah) dan Kopri (Korp Pegawai Republik Indonesia) yang artinya NU berada dimana-mana.[97]

NU yang merupakan organisasi Islam, menjatuhkan pilihannya kepada PPP selain karena berasaskan Islam, diharapkan PPP mampu menjembatani NU dalam rangka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan aspirasi umat Islam untuk pembangunan. Namun harapan tersebut tidak dapat diwujudkan dikarenakan adanya oknum-oknum yang berupaya menyelewengkan PPP, dan mencoba untuk membersihkan tokoh-tokoh NU yang dianggap radikal.

Pada pemilihan umum 1982, ada upaya dari beberapa tokoh NU yang menyatakan bahwa NU keluar dari PPP, namun upaya ini bukan berarti NU menentang pemerintah, melainkan hanya sebagai koreksi terhadap pimpinan PPP yang memanfaatkan partai seolah-olah milik pribadinya dengan tidak mengindahkan asas-asas musyawarah. Salah satu sebab dari upaya tokoh NU ini dikarenakan adanya tokoh non NU dalam PPP yang menginginkan[98] ada upaya peninjauan kembali kepada upaya penyetaraan terhadap mayoritas NU terhadap PPP, sedangkan tokoh NU sendiri yakin bahwa dirinya tetap menjadi mayoritas jika dilihat dari dukungan suara. Kekecewaan warga NU juga dikarenakan adanya pihak yang terkesan memanfaatkan suara NU.

---

[97] Choirul Anwar, "Mencari Hikmah Dibalik Kemelut MI-NU dalam PPP", Surabaya Post (Selasa, 16 Februari 1982), 1.

[98] dalam hal ini dikhusukan kepada Parmusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbagai alasan di atas, direspon oleh berbagai tokoh NU non politik. Mereka berupaya agar NU dapat keluar dari kancah perpolitikan dan kembali befokus ke masalah sosial keagaan, yang artinya warga NU tidak lagi diwajibkan untuk memilih partai manapun, sehingga aspirasi politik warga NU tidak lagi atas dasar legitimasi NU. Dengan alasan tersebut maka diadakannya Rapat PBNU Syuriah yang membahas tentang politik antara NU dengan PPP. Hasil dari rapat PB syuriah, pada tanggal 29 Janurai 1982 seperti yang ditulis oleh Surabaya Post, sebagai berikut:

> Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa:
> 1. Umat Islam harus senantiasa berada dalam kebaikan, sedangkan kelemahan berada dalam tubuh kepemimpinan yang membina dan yang mengarahkannya.
> 2. Kemelut yang terjadi dalam lingkungan interen jam'iyah NU dan Partai Persatuan Pembangunan harus diselesaikaikan dengan tuntas, karena akan membahayakan perjuangan umat Islam dan menganggu kelancaran pembangunan nasional yang sedang dijalankan.
>
> Atas dasar pendapat di atas, Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama' memutuskan:
> 1. Akan mempertimbangkan kedudukan jami'yah Nahdlatul Ulama' dalam lingkungan PPP pada saat yang tepat, apabila asas musyawarah, solidaritas interen dan prinsip-prisip organisasi tidak dapat ditegakkan di dalamnya.
> 2. Menyerukan agar warga jamiyah NU, berpartisipasi dalam pemilu 1982 engan menjunjung tinggi asas "Luber"[99] dan demokrasi sesuai dengan keputusan musyawarah nasional NU di Kaliurang tanggal 30 Agustus sampai 2 September 1981.[100]

Pernyataan ini ditandatangani oleh beberapa tokoh tokoh NU, terutama yang mengikuti sidang tersebut, antara lain pelopor KH. Abdurrhman Wahid, Rois 'Aam Syuriah KH. Ali Maksum dan ketua I

[99] Asas LUBER, merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas ini merupakan asas pemilihan umum di Indonesia yang sudah ada sejak Orde Baru.
[100] Yusuf, "NU Memutuskan secara prinsip keluar dari PPP", Surabaya Post (3 Februari 1983), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanfidziyah KH. Yusuf Hasyim. Pernyataan dari PBNU Syuriah ini merupakan upaya dari NU untuk lepas dari PPP dan meupakan pernyataan yang diarahkan langsung kepada H.J. Naro agar segera melakukan perbaikan langkah. Dengan adanya pernyataan PBNU syuriah membuat semakin jelasnya tokoh NU yang menginginkan NU keluar dari PPP.

Namun memang pada kenyataannya tidak semua kalangan NU menyetujui adanya keputusan yang ditetapkan oleh PBNU Syuriah, salah satunya adalah KH. Idham Chalid yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut. Pendapat yang sama juga datang dari salah satu pengurus wilayah NU, salah satunya adalah Jawa Timur, yakni H. Sulaiman Bijahimo selaku sekretaris PWNU Jawa Timur dan juga salah satu unsur dewan pimpinan wilayah PPP seperti yang dikutip oleh Surabaya post, menyatakan bahwa:

> "NU Jawa Timur justru berkehendak memantapkan kedudukan NU dalam pimpinan PPP, menurut berita yang saya baca disurat kabar, hanya segolongan kecil saja dalam pimpinan NU yang menginginkan keluarnya NU dari PPP"

Beliau juga mengatakan bahwa

> "selama UU No. 3 tahun 1975 masih sebagaimana adanya sekarang, maka kemungkinan hanya kecil bagi NU untuk keluar dari PPP"[101]

H. Sulaiman Bijamhimo juga menambahkan bahwa rapat PB Syuriah tidak dapat memutuskan mengenai kedudukan NU di dalam PPP, karena wewenang tersebut hanya dapat diputuskan dalam muktamar NU dan konferensi besar NU. Konferensi besar NU terdiri dari syuriah dan

[101] Yusuf, "NU Jawa Timur Justru menginginkan Pemantapan Kedudukan NU dalam pimpinan PPP", Surabaya Post (Selasa 2 Februari 1982), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanfidziyah, dua wakil dari tiap wilayah (syuriah dan tanfidziyah) dan satu wakil dari tiap lima cabang NU. Selain itu dalam rapat PB syuriah NU, H. Sulaiman menyatakan tidak ada wakil dari PWNU Jawa Timur yang mewakili rapat teesebut.

KH. Chalid Mawardi, selaku ketua gerakan pemuda ansor, juga berpendapat tidak jauh berbeda dengan pengurus wilayah NU Jawa Timur, beliau berpendapat bahwa hendaknya NU membentuk suatu biro politik yang non struktural, yang merupakan badan pemikir dan penyumbang konsep-konsep politik. Alasan beliau dalam mengusulkan biro politik ini adalah agar jam'iyah NU tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka NU tidak akan terlibat. Menurutnya, keruwetan yang terjadi akhir-akhir ini dikarenakan NU sebagai organisasi, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan politik.

Struktur dan ide yang dilontarkan oleh KH.Chalid Mawardi diatur agar syuriah dan tanfidziyah dalam NU tidak terlibat dan jangan sampai terlibat dalam keputusan-keputusan yang bersifat politik praktis, beliau juga menyatakan dalam wawancara dengan kompas media, bahwa:

> "kalaupun NU mensyaratkan keluar dari partai persatuan pembangunan, itu akan merugikan NU sendiri, sebab tidak lagi mempunyai tempat untuk penyaluran aspirasi rakyat yang diwakilkannya"[102]

Dengan tetapnya NU di PPP Masyarakat NU mempunyai wadah untuk memperjuangkan aspirasinya, ditambahkan lagi oleh KH. Chalid,

[102] Chalid, "Keluar dari PPP akan merugikan NU Sendiri", Kompas (2 Februari 1982), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang penting bagi pengurus PBNU adalah menuntaskan fusi, bukan dengan membuat partai baru. Sebab kalau NU diizinkan menjadi partai baru, unsur lainpun akan berbuat serupa.

Puncak dari dinamika NU tehadap PPP terjadi menjelang pemilu 1982, tepatnya pada bulan Mei 1982. Para ulama sepuh NU seperti KH.As'ad, KH. Mahrus Ali, KH. Ali Maksum dan KH. Achmad Siddiq, berkumpul di kediaman KH. Abdul Mudjib Ridwan yang berada di Jl. Bubutan VI, Surabaya guna membicarakan tentang masa depan NU. Para ulama' beranggapan setelah wafatnya KH. Bisri Syamsuri, NU sebagai salah satu organisasi terbesar mengalami banyak kemerosotan. Lantas dicarilah sebab musabab kemerosotan tersebut, hingga akhirnya para ulama sepuh mendapatkan beberapa kesimpulan:

1. Porsi kegiatan sosial terlalu kecil, bahkan jauh lebih tinggi daripada kegiatan politik praktis;
2. Kepemimpinan KH. Idham Chalid lebih berorientasi kepada urusan PPP (kala itu menjadi presiden partai) dan kurang memperhatikan garapan NU. Akibatnya NU, menjadi tidak terurus alias terbengkalai;
3. Kondisi kesehatan KH. Idham Chalid kurang mendukung dan sering sakit sakitan.[103]

Atas hasil pertemuan tersebut, maka beberapa kiai sepuh berangkat ke Jakarta untuk menemui KH. Idham Chalid, dan menyampaikan perihal apa yang dipertimbangkan oleh para ulama.

[103] Hasan Basri, *KHR. As'ad Syamsul Arifi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (Surabaya: CV. Sahabat ilmu, 1994), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sampai di rumah KH. Idham Chalid para kiai sepuh menyampaikan apa yang telah disepakati bersama dalam pertemuan yang ada di Surabaya. Hasil dari pembicaraan tersebut, akhirnya mencapai kesepakatan yaitu adanya pernyataan pengunduran diri KH. Idham Chalid, dengan alasan karena kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan melaksanakan amanat muktamar sebagai ketua umum.

Pada tanggal 2 Mei 1982, dihadapan para ulama sepuh, KH. Idham Chalid menyatakan mengundurkan diri secara resmi, dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. KH. Idham Chalid meminta syarat agar pernyataan penguduran diri tersebut diubah tanggal yang awalnya, 2 Mei menjadi 6 Mei dengan alasan kekhawatiran akan adanya polemik sebelum Pemilu tanggal 4 Mei.[104] Namun pada tanggal 4 Mei, berita yang seharusnya dipublikasikan pada 6 Mei sudah bocor, dengan adanya protes dari cabang Surabaya mengenai kemunduran dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan kubu politik NU yang terdiri dari 17 dari 26 cabang NU, menyatakan menolak atas pengunduran diri KH. Idham Chalid dan meminginkan agar beliau tetap memduduki jabatannya.[105]

Atas alasan tersebut, pada tanggal 14 Mei 1982 KH. Idham Chalid menyatakan untuk mencabut kembali surat pernyataan pengunduran diri dan menyatakan aktif kembali menjadi ketua PBNU. Mulai saat itulah terdapat dua kubu yaitu kubu pertama yaitu kubu Cipete

[104] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, 124
[105] Andre Feilland, *NU Vis a Vis Negara*, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin oleh KH. Idham Chalid, yang tetap menginginkan NU berpolitik dan beranggapan bahaw KH. Idham Chalid tetap sah menjadi ketua umum dikarenakan adanya surat pencabutan pengunduran diri. Sedangkan kubu kedua yaitu kubu Situbondo dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin dan para kiai sepuh yang menginginkan NU keluar dari politik praktis dan kembli berfokus pada masalah sosial,[106] kubu Situbondo beranggapan bahwa KH. Idham sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan jabatan sementara dipegang oleh KH. Ali Maksum.[107]

Pertentangan antara kubu Cipete dan Situbondo merembet pada kegiatan muktamar NU ke 27. Pertentangan ini diawali dengan adanya rapat PBNU yang dilakukan oleh kubu Cipete untuk memutuskan kepanitiaan muktamar ke 27, rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 November 1982, di rumah Nuruddin Lubis, yang merupakan ketua IV PBNU dan wakil ketua DPR RI. Rapat yang dipimpin oleh KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU, menetapkan SK PBNU 13 Januari 1983 yang berisi tentang susuan kepanitiaan muktamar NU ke 27 yang diketuai oleh KH. Chalid Mawardi. Kubu Cipete beranggapan bahwa surat keputusan tersebut sah dikarenakan ditunjuk oleh pengurus yang sah, tetapi dipihak lain kubu Situbondo yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin dan didukung oleh Rois 'Aam Syuriah PBNU

[106] Ibid, 226
[107] Patmono, "NU tidak bisa lepas dari partai politik", Sianar Harapan (14 Desember 1883), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa kepanitiaan tersebut tidak sah karena dipimpin oleh ketua umum yang telah mengundurkan diri.[108]

Oleh karena itu, perselisihan diatas menunjukan dinamika antara tokoh NU yang menginginkan NU tetap berada dalam PPP dan tokoh NU yang menginginkan NU keluar dari PPP dan meninggalkan politik praktis, menjadi salah satu polemik yang mengiringi perjalanan NU menuju khittah 1926 dalam muktamar NU ke 27 di Pondok Pesantren Salafiayah Syafi'iyah Situbondo.

C. Tokoh-Tokoh NU dan PPP Dalam Peristiwa Khittah 1926.

Peristiwa khittah tentunya terdapat tokoh-tokoh baik yang pro dan kontra terhadap kembalinya NU ke khittah. Jika dilihat dari penjelasan diatas terdapat kelompok yang pro adalah kubu Situbondo, sedangkan kelompok yang kontra adalah kelompok Cipete. Berikut ini akan penulis jelaskan beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa kembalinya NU ke khittah 1926.

1. Tokoh-tokoh yang setuju terhadap kembalinya NU ke Khittah

a. KH. As'ad Syamsul Arifin

Kiai As'ad lahir di Kota Suci Makkah tahun 1897 M. Beliau merupakan putra dari KH. R. Syamsul Arifin, yang merupakan ulama' asal Madura yang telah lama bermukim di Tanah Suci, dan kemudian pulang ke kampung halaman, yakni

[108] Ibdi, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kembang Kuning, Pamekasan, Madura.[109] Karir pendidikan beliau berawal dari Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Pondok Pesantren Syaikhona Cholil Bangkalan, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalanpanji Sidoarjo dan kemudian dilanjutakan dengan menimba ilmu di Makkah selama 9 tahun.

Beliau merupakan salah satu santri KH. Cholil yang ditugaskan untuk datang kepada KH. Hasyim Asy'ari dengan membawa tongkat untuk mengisyaratkan bahwa beliau setuju dengan pendirian jam'iyah NU, sehingga dapat dikatakan bahwa beliau juga salah satu tokoh dibalik berdirinya NU. Beliau juga merupakan salah satu pejuang Hizbullah yang bergerilya di daerah Jember. Menjelang wafatnya KH. Hasyim Asy'ari, beliau menerima wasiat khusus dari Kiai Hasyim, agar jam'iyah NU tetap dipelihara dan tidak boleh terpecah-pecah.[110]

Karir politik beliau diawali pada pemilihan umum tahun 1955 mengantarkan beliau menjadi anggota konstituante sampai tahun 1959. Pada pemilihan umum 1971, KH. As'ad terpilih menjadi anggota DPRD Situbondo mewakili NU. Pemilu selanjutnya tahun 1977, beliau disibukkan dengan upayanya

[109] Saifullah Maksum, *Menapak Jejak Mengenal Watak*, (Jakarta: Yayasan Safiuddin Zuhri, 1994), 148.
[110] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Utsuwah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung NU dalam fusinya di PPP. Nama KH. As'ad semakin dikenal publik setelah adanya upaya NU kembali ke Khiitah dan beliau merupakan salah satu pimimpinan kubu Situbondo yang mendukung agar NU keluar dari partai politik. Upaya tersebut terbukti dengan adanya keputusan muktamar NU ke 27 di Situbondo.[111]

KH. As'ad merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo sejak tahun 1951,[112] yang berdiri diatas tanah seluas 15 hektar, dengan jumlah santri sekitar 8000 orang. Terobosan yang dilakukan KH. As'ad yaitu dengan membuka Ma'had Aly dan Institut Agama Islam Ibrahimiy.[113] KH. As'ad wafat pada hari Sabtu 4 Agustus 1990 M/ 13 Muharam 1411 H. dan dimakamkan di area pesantren dan berdampingan dengan makam ayahnya KH. R. Syamsul Arifin.[114]

b. KH. Achmd Siddiq

KH. Achmad Siddiq lahir di Jember, pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 H/ 24 Januari 1926 M.[115] Beliau merupakan putra bungsu KH. Muhmmad Siddiq dan Nyai Maryam. Ia adalah adik kandung KH. Mahfud Siddiq. Pendidikan belau diawali dari

---

[111] Ibid., 190.
[112]Ma'shum, *Mengenal Jejak Menapak Watak,* 149,
[113] Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 21.
[114] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, 192.
[115] Munawwar Fuad Noeh, Matuski HS, *Menghimpun Ruh Pemikiran K.H Achmad Siddiq* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SR (sekolah Rakyat) Islam di Jember, kemudian melanjutkan di Madrasah Salafiyah Pesantren Tebuireng.[116] Di Pesantren inilah beliau belajar banyak tentang keterampilan mengetik, konsep-konsep organisasi dan kader utama KH. A. Wahid Hasyim.

Pengalaman beliau pernah menjadi koordinator Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII, Ormas pemuda di bawah naungan Masyumi) untuk wilayah Jember, Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum PWNU Jawa Timur, menggantikan kakaknya KH. Abdullah Siddiq. Pada muktamar NU ke 27 di Situbondo, beliau menjadi salah satu pemrakarsa gerakan kembalinya NU ke khittah NU 1926 dan terpilih menjadi Rois 'Aam PBNU menggantikan KH. Ali Maksum. Selain upayanya memperjuangkan kembalinya NU ke khittah, KH. Ahmad Siddiq juga aktif dalam mengasuh Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah di Jember.[117]

KH. Achamd Siddiq wafat pada tanggal 23 Januari 1991, setelah dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Atas permintaan dirinya sebelum meninggal, jenazah dimakamkan di Komplek Makam Aulia Desa Mojo, Kediri. [118]

c. KH. Machrus Ali

[116] Abdussami, Humaidy, dan Ridwan Fakta, *Biografi Lima Rois' 'Aam Nahdlatul Ulama'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LTN-NU, 1995), 146.
[117] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, 176.
[118] Ibid., 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Machrus lahir di Dukuh Gedongan, Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat tahun 1906.[119] Ayahnya, Kiai Ali bin Abdul Aziz adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Gedongan dan kakeknya merupakan ulama besar Jawa Barat abad 18 M. Pendidikan pertama beliau berasal dari orang tuanya di Pondok Pesantren Ender yang didirikan oleh kakeknya, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Panggul, Tegal yang diasuh oleh Kiai Muchlas dan Pondok Pesantren Kasingan, Rembang asuhan Kiai Cholil Harun. Setelah itu pendidikan ia lanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, mengaji temporal di Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Magelang, asuhan KH. Dalhar.

Kemudian tahun 1954 beliau menjadi pemangku Pondok Pesantren Lirboyo yag didirikan mertuanya, yakni KH. Abdul Karim dan KH. Marzuqi Dahlan yang juga menantunya KH. Abdul Karim. Pada 11 Rajab 1386 H/ 25 Oktober 1965, beliau mendirikan Universitas Islam Tribakti dan menjadi rektor pertama.

Sejak muda KH. Machrus lebih banyak berkiprah di luar kepengurusan NU, ini terbukti ketika pecahnya perang mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 10 November 1945, ia turut terjun langsung di tengah medan pertempuran bersama

[119] Rahmad Abdullah, "Biografi KH. Ali Mahrus", dalam www.lirboyo.net/KH-Mahrus-Aly-1907-1985/ (02 Juni 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para santrinya yang bergabung dalam barisan Hisbullah. Ia juga salah satu utusan PCNU Kota Kediri dalam muktamar Palembang (1952) yang memutuskan keluarnya NU dari Masyumi. Ia kemudian diangkat menjadi Rois Syuriah PCNU Kota Kediri (1953-1958) dan pada tahun 1958 beliau menjadi Rois Syuriah PWNU Jawa Timur.[120]

Dia dikenal sebagai juru islah para kiai yang berani. beliau bersama-sama dengan KH. As'ad dan KH. Ahmad Siddiq juga datang ke rumah ketua umum PBNU KH. Idham Chalid untuk memintanya mundur dari jabatan. Dalam upayanya memperjuangkan NU menuju khittah, beliau bersikap netral tidak memihak pada pihak Cipete maupaun Situbondo, sehingga beliau lebih ditugaskan sebagai juru damai antara dua kubu tersebut.

Beliau wafat, pada hari Senin 6 Ramadhan 1405 H/ 26 Mei 1985 dalam usia 85 tahun, dan mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan secara militer. Jenazah Kiai Mahrus dimakamkan di pemakaman keluarga di sebelah barat masjid Pondok Pesantren Lirboyo.[121]

2. Tokoh-tokoh yang tidak setuju terhadap kembalinya NU ke Khittah

a. KH. Idham Chalid

[120] Matsuki H.S, *Intelektual Pesantren Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 150.
[121] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idham Chalid lahir pada tanggal 5 Januari 1921 M/ 5 Muharram 1341 H, di Desa Setui, Amuntai, Kalimantan Selatan. Ayahnya merupakan seorang pengasuh pesantren di Hulusungai Kalimantan, beliau juga merupakan salah satu kader dari KH. A. Wahid Hasyim. Pendidikan beliau diawali dengan mengenyam Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di kampung halamannya. Pendidikan selanjutnya dilanjutkan ke Kulliyatul Muallimin Islamiyah (KMI) Putra Gontor, Ponorogo, tamat 1942. Setahun menjadi guru di almamaternya (1943-1944), kemudian kembali ke Amuntai dan menjadi guru SMA.[122]

Pengabdiannya dalam NU, beliau pernah menjabat sebagai ketua PP LP Ma'arif NU, PP GP Ansor, Sekretaris Umum PBNU (1952-1956). Pak Idham diberikan amanah untuk memimpin PBNU sejak muktamar NU ke 21 di Medan (1956) hingga muktamar ke 26 di Semarang (1979) selama enam periode.[123]

Beliau merupakan salah satu penggagas berdirinya PPP, dan yang menandatangani pendirian partai yang mewakili NU sebagai salah satu fusi Partai Persatuan Pembangunan. Beliau juga sangat teguh dalam pendiriannya untuk tetap mempertahankan NU tetap berpolitik praktis, dalam proses NU menuju khittah beliaulah yang bersikukuh untuk mempertahankan

[122] Matsuki, *Intelektual Pesantren*, 265.
[123] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU tetap berpolitik dan menjadi salah satu pimpinan kelompok Cipete yang bisa disebut sebagai sayap politik NU. Jabatannya sebagai Presiden Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum PBNU membuat dirinya berusaha keras untuk membesarkan NU dengan jalan politik praktis melalui PPP.[124]

Muktamar NU ke 27 di Situbondo mengakhiri aktifitas KH. Idham Chalid di NU, dengan dipilihnya KH. Abdurraman Wahid sebaga Ketua PBNU.

b. KH. Chalid Mawardi

Chalid Mawardi lahir di Keprabon Wetan, Solo, 11 September 1936. Chalid lahir dari rahim Hj. Mahmudah Mawardi, yang merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU yang pertama setelah menjadi banom NU. Sejak kecil, Chalid terbiasa hidup di lingkungan pesantren yang diasuh oleh kakeknya, yaitu Al-Masyhudiyah, Solo. Beliau melanjutkan pendidikan di Madrasan Ibtidaiyah Sunniyah Mangkunegaran, kemudian masuk MTs Al-Islam Kawatan, SMP Negeri VI Benteng dan SMAN III Margiyudan yang kesemuanya berada di wilayah Solo. Tidak sampai disitu, beliau melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan School of Jurnalism Universitas Minnesota Minneapolis USA, namun gelar masternya tidak didapatkannya dikarenakan tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya.

[124] Ibid., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman organisasinya adalah beliau merupakan salah satu penggagas berdirinya PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), kemudian menjadi ketua umum PP GP Ansor (1980-1985). Dalam politik beliau merupakan salah satu Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP atas penugasan PBNU, beliau juga salah satu tokoh NU yang memperjuangkan agar NU tetap dalam PPP. Di tengah bersinarnya karir Chalid selaku politisi dan kader NU, suhu politik dalam negeri semakin memanas dengan adanya pertentangan antara NU dengan MI. Akibat dari gesekan tersebut membuat membuat Chalid terkena dampaknya, sehingga KH Idham Chalid diberhentikan dari jabatan dan keanggotaan PPP, setelah menentang pembentukan gerakan pemuda Ka'bah.

Di masa tuanya, Chalid lebih menekuni dunia Tarekat Syadziliyah sejak tahun 2003 dengan bimbingan Mursyid Habib Lutfi Pekalongan.[125]

c. KH. Anwar Musaddad

KH. Anawar Musaddad lahir di Garut tanggal 3 April 1909. Anwar mendapatkan pendidikan formal pertama di *Volk School* (setingkat SD), kemudian melanjutkan ke MULO (setingkat SMP) dari Garut beliau melanjutkan ke AMS (setingkat SMA) di Sukabumi, semua jenjang pendidikan yang dilalui Anwar pada saat ini adalah sekolah Katolik. Setelah itu

[125] Ibid., 206-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Wanajara, Garut, kemudian melanjutkan menimba ilmu di Tanah Suci yaitu di Madrasah Al-Falah Makkah selama 11 tahun. Selain belajar ilmu agama beliau juga ahli dalam berbahasa Inggris dan Matematika.[126]

Karir beliau dimulai ketika pemilihan umum tahun 1955 mengantarkan dirinya sebagai anggota DPR RI yang mewakili NU sampai tahun 1967, selain menjadi anggota DPR RI beliau juga menjadi Ketua PP LP Ma'arif NU (1957), Rois Syuriah III PBNU dalam hasil muktamar di Bandung (1974) dan Wakil Rois 'Aam PBNU hasil muktamar Semarang (1979). Beliau merupakan salah satu ulama yang duduk di kalangan syuriah yang mendukung NU tetap berpolitik, hal ini terbukti dengan dukungannya kepada KH. Idham Chalid, selain itu beliau dan KH. Idham berupaya untuk mendapatkan jabatan Ketua Rois 'Aam PBNU demi untuk memperkuata posisi KH. Idham menjadi Ketua Umum PBNU.

Diantara ciri khas KH. Anwar Musaddad adalah setiap memberikan pengajian beliau selalu menggunakan layar lebar. Dimasa tuanya beliau aktif di Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kiai Anwar Musaddad wafat pada 19 Rabi'utstsani 1422 M/ 21 Juni 2000 H dalam usia 91 tahun. Beliau dimakamkan di komplek

[126] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaman keluarga Pondok Pesantren Musaddadiyah, Garut, Jawa Barat.[127]

[127] Nilna Herlina Lubis, dkk, *Biografi Prof.K.H. Anwar Musaddad* (Jawa Barat: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DINAMIKA POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PASCA KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926 (1984-1992)

A. Partai Persatuan Pembanguna pada Masa Kepemimpinan H. Djailani Naro (1984-1989)

Djaelani Naro, yang lebih populer dengan nama H.J. Naro atau John Naro, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 3 Januari 1929. Beliau merupakan mantan jaksa yang kemudian terjun ke dalam dunia politik dan menjadi politisi Partai Persatuan Pembangunan. Karir politik beliau sebelum menjadi Ketua Umum PPP adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 1971-1972, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) 1972-1977, 1977-1978 dan Ketua IV DPP Partai Persatuan Pembangunan.[128]

H. Djailani Naro diangkat sebagai Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) setelah H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri pada tahun 1984, dan jabatan ketua umum dipegang H.J. Naro sampai diselenggarakannya muktamar I PPP tahun 1984.[129] Terpilihnya H.J. Naro tidak dapat dipungkiri adalah campur tangan pemerintah Soeharto dalam upaya untuk mengerdilkan PPP.[130] Pada awal periode kepemimpinannya H.J. Naro masih bersifat akomodatif dikarenakan masih adanya sosok kiai sepuh yang sangat berpengauh di

[128] "Djailani Naro", dalam wikipedia.or (26 Mei 2018)
[129] Tim Media, "Sejarah PPP", dalam www.PPP.or.id (26 Mei 2018)
[130] Didik Noman Zein, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPP yaitu KH. Bisri Syamsuri. Setelah wafatnya Ris A'am Majelis Syuro KH. Bisri Syamsuri, maka perubahan sikap dalam mengambil kebijakan oleh Naro semakin terlihat.

Perubahan pengambilan kebijakan tersebut banyak merugikan NU, seperti yang sudah disebutkan diatas, salah satunya adalah pengambilan keputusan secara sepihak oleh H.J. Naro dalam dukungannya terhadap UU Pemilu dan pengambil kebijakan yang dianggap nekat, yaitu dengan menyerahkan daftar Caleg kepada pemerintah menjelang pemilu 1982.[131] Beberapa keputusan yang dianggap NU tidak mengedepankan asas musyawarah membaut kekecewaan di pihak NU semakin memuncak. Pada Muktamar I PPP 1984 di Ancol, dipilihlah kembali H.J. Naro menjadi ketua umum PPP dan digusurnya tokoh-tokoh NU idealis,[132] membuat adanya upaya dari pihak NU untuk menarik suara dari PPP, yang membuat adanya dinamika politik antara PPP dan NU. Hal ini terjadi disebabkan karena posisi NU telah kembali ke khittah dan keluar dari PPP.

1. Penggembosan PPP dan Penurunan suara pada Pemilu 1987

Pada muktamar NU ke 27 telah diputuskan bahwa NU telah keluar dari partai politik dan memutuskan untuk menfokuskan kegiatannya dalam Jam'iyah Diniyah. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya NU telah keluar dari politik. Hal ini terbukti dari upaya KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menggulingkan kepemimpinan Naro yang pada saat ini menjadi Ketua Umum DPP

[131] Marijan, *Quo Vadis NU*, 128.
[132] Ibid., 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPP setelah terpilih pada muktamar I PPP. Upaya yang dilakukan KH. As'ad adalah dengan menyampaikan maksudnya kepada Mendagri Suparjo Rustama bahwa Naro harus dikeluarkan dari pimpinan partai PPP.[133]

Upaya KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menegaskan bahwa NU tidak memiliki kaitan dengan PPP, dilakukan dengan adanya penegasan dari KH. As'ad yang diwakili oleh Mahbub Djunaidi seperti yang ditulis dalam Koran Harian Pelita, bahwa:

> Dalam Pemilu 1987 nanti warga NU wajib mensukseskan pesta demokrasi. Tetapi tidak wajib berkampanye untuk PPP dan tidak wajib pula mencoblos PPP. Sekali lagi NU bukan PPP dan PPP bukan NU, karena keduanya punya dunia sendiri-sendiri. Keduanya tidak memiliki ikatan organisatoris. Ini merupakan keputusan Muktamar PPP sendiri dan keputusan Muktamar NU ke 27.[134]

Adanya penegasan dari KH. As'ad yang diwakili Mahbub Djunaidi tidak serta-merta diikuti oleh semua warga NU. Hal ini dibuktikan dengan adanya tarik menarik antara warga NU yang tetap memberikan dukungannya terhadap PPP dan pihak yang konsisten terhadap keputusan muktamar NU ke 27 di Situbondo, menjelang pemilu 1987.

Upaya yang dilakukan oleh warga NU untuk tetap mendukung PPP adalah dikarenakan PPP merupakan satu satunya partai Islam dan dianggap mampu mewakili Umat. KH. Syamsuri Baidhawi merupakan salah satu politisi NU yang tetap mendukung PPP dengan

[133] Ibid., 159.
[134] Mahbub Djunaidi, "Warga NU Tidak Wajib Kampanya/ Coblos PPP", Harian Pelita (31 Oktober 1985), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengintruksikan kepada seluruh santrinya untuk tetap mensukseskan pemilihan umum tahun 1987 dengan tetap milih PPP.[135] selain KH. Syamsuri, juga terdapat tokoh lain yang tetap mendukung suaranya dalam PPP antara lain H. Imron Rosyadi, Imam Sofwan dan beberapa tokoh NU lainnya.[136] Upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh NU selain karena mereka masih mempunyai posisi di PPP, juga karena pandangan mereka bahwa PPP merupakan satu-satunya wadah aspirasi politik NU.

Aksi yang dilakukan oleh beberapa tokoh NU yang masih mendukung PPP ditambah dengan kekecewan yang mendalam terhadap Naro yang mengibaratkan bahwa orang NU yang keluar dari PPP sebagai "Telur Busuk" yang dikatakan pada HUT PPP ke 14 di Bandung,[137] kemudian mendapatkan respon dari tokoh NU yang konsisten terhadap hasil muktamar, seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Sohib Bisri, H. Syafi'i Sulaiman, H. Hasyim Latief, KH. Yusuf Hasyim, Mahbub Djunaidi dan sederetan tokoh NU lainnya. Mereka melakukan aksi yang dikenal dengan "Aksi Peneggembosan"[138], aksi ini diilakukan di basis-basis utama NU yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.[139]

---

[135] Ulum, *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi",* 96.
[136] Marijan, *Quo Vadis NU*, 160.
[137]A. Lukman, "Bintang, Telur Busuk dan Kursi", Kompas (21 Maret 1987), 16.
[138] Istilah ini berasal dari kata "Kempes" yang dipinjam oleh Mahbub Djunaidi dan Nurcholis yang mengibaratkan bahwa dan demokrasi PPP yang sebagian besar dari NU sedang digembosi atau ditarik suaranya dari PPP.
[139] Ulum, *Bodohnya NU*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggembosan yang dilakukan berbagai tokoh NU sudah mulai dilakukan setahun sebelum pemilihan umum tahun 1987. H. Syafi'i Sulaiman, misalnya, telah melakukan upaya penggembosan PPP sejak 20 Agustus 1986, yang mengatakan bahwa NU bukan PPP, bukan Golkar dan juga bukan PDI. Aksi penggembosan juga dilakukan oleh beberapa pondok yang ada di Yogyakarta dengan membuat *Bahtsul Masa'il* yang hasilnya sangat menguntungan Golkar dan partai politik lain selain PPP.[140]

Aksi penggembosan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pidato, kajian dan juga ceramah, tetapi sudah menggunakan sebuah instruksi PBNU yang ditandatangani beberapa tokoh NU antara lain KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid dan HM. Anwar Nuris, yang tertanggal pada 16 April 1987 dan dibuat oleh Mahbub Djunaidi dan H.M. Yusuf Hasyim. Surat tersebut berisikan beberapa butir instrukisi, yaitu:

a. Seluruh warga NU, baik aktvis/fungsionaris maupun anggota biasa/ simpatisan di manapun berada dilarang/haram menconblos tanda gambar bintang /PPP pada pemilu 23 April 1987 nanti.
b. Seluruh warga NU tersebut tadi dilarang/haram menjadi Golput.
c. Diperintahkan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu dari Golkar atau PDI dengan landasan *akhlaqul karimah*.

[140] Marijan, *Quo Vadis NU*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Agar pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama' di segala tingkatan meningkatkan kerjasama dengan aparat pemerintahan dan pelaksana pemilu, terutama dalam rangka mengadakan pendataan terhadap aktivis/fungsionaris serta warga NU yang selama masa kampanye aktif mendukung PPP, baik tenaga, harta maupun dalam wujud tingkah laku, terlebih lagi bersifat menfitnah dan mendiskreditkan ulama dan jam'iyah itu sendiri.

e. Agar para *alim ulama'* menggerakkan dan meningkatkan gerakan batin, baik dengan shalat hajat, istighosah maupun pembacaan khizib dan do'a. bukan saja untuk meningkatkan *taqarrub* kita kepada Allah SWT, tetapi lebih dari itu agar gerakan ulama yang terselubung PPP segera mendapatkan penyelesaian dari Allah SWT sesuai dengan upaya selama ini.

f. Agar pengajian/majelis *ta'lim* dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan/dilakukan oleh Nahdlatul Ulama setelah pemilu 1987 tidak lagi melibatkan warga NU yang termasuk data pada butir ke 4 di atas.[141]

Pada tanggal 21 April 1987, KH. Acmad Siddiq selaku Rois 'Aam meminta kepada PWNU Jawa Timur untuk menjelaskan kepada warga NU bahwa PBNU tidak pernah merasa mengeluarkan instruksi tersebut. Hal ini membuat banyak warga NU mempertanyakan keabsahan instruksi tersebut, selain itu KH. As'ad Symasul Arifin

[141] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan KH. Achmad Siddiq.[142] Beliau KH. As'ad menyanggah adanya penggembosan yang mengatasnamakan dirinya, beliau juga berpendapat haram hukumnya bagi seluruh waga NU untuk melakukan penggembosan kepada salah satu dari tiga kontestan pemilu, beliau menambahkan bahwa siapa pun yang suka menggembosi, maka tidak sah baginya untuk mengimami sholat dan menjadi wali bagi anaknya.[143]

Terlepas dari benar tidaknya instruksi tersebut, membuat banyak kalangan terutama PPP sangat dirugikan. Kerugian yang paling nampak dari aksi ini adalah turunnya suara PPP secara drastis dalam pemilihan umum tahun 1987 jika dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 1982. Hal ini wajar dikarenakan adanya peralihan secara besar-besaran suara dari warga NU kepada partai politik lain dikarenakan adanya penggembosan PPP.

Hasil pemilihan umum tahun 1987, PPP mengalami kemerosotan terbesar, yakni dengan kehilangan 333 kursi jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1982, sehingga hanya menjadi 61. Sementara Golkar dan PDI masing-masing memperoleh tambahan 53 kursi dan 10 kursi. berikut merupakan tabel hasil pemilihan umum tahun 1987.

---

[142] Ibid., 164-165.
[143] Hariono, "PPP Jatim Harapkan Pemerintah Ambil Langkah Tegas", Harian Suara Indonesia (14 April 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3

Hasil Pemilihan Umum tahun 1987[144]

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan	13.701.428	61
2.	Partai Golongan Karya	62.783.680	299
3.	Partai Demokrasi Indonesia	9.384.708	40

Sumber: Sumber: Diambil dari www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id. Diakses tanggal 18/06/2018.

Penurunan suara yang cukup derastis terjadi dibasis-basis kuat NU diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengalami penurunan hampir 50% jika dibandingkan pemilihan umum sebelumnya.

2. Pencalonan diri sebagai Wakil Presiden

H. Djailani Naro merupakan Ketua Umum PPP yang memiliki sifat ambisius dalam mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Hal ini dibuktikan dengan salah satu peristiwa penting di akhir kepemimpinan beliau, yaitu upaya beliau dalam mengajukan namanya untuk mendamping Soeharto menjadi wakil presiden. Upaya yang dilakukan H. Naro, dikarenakan presiden Soeharto mulai melirik partai politik Islam untuk mendampinginya sebagai wakilnya,[145] selain itu PPP selalu menjadi partai pemenang kedua setelah Golkar pada pemilihan-pemilihan sebelumnya.

[144] Tim Keputakaan Presiden, "Pemilihan Umum Tahun 1987", dalam www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id (25 April 2018)
[145] Hafid Maksum, *Wawancara*, Jombang, 27 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghadapi pernyataan pencalonan tersebut, berbagai kalangan terutama kader PPP mendukung upaya yang dilakukan Ketua Umum DPP PPP tersebut. Pernyataan pengajuan wakil presiden yang dilakukan oleh Naro menunjukan adanya upaya menegakkan asas demokrasi yang mana semua partai politik memiliki hak yang sama dalam menduduki jabatan pemerintahan termasuk wakil presiden. Naro membuktikan sebagai ketua umum berani mengajukan diri sebagai wakil dari PPP di tengah dominasi Golkar di pemerintahan.[146]

Tetapi upaya yang dilakukan Naro direspon tidak baik oleh presiden Soeharto, presiden Soeharto tidak berkenan dengan pencalonan tersebut di keranakan sifat dari Naro yang terlalu ambisius dan beranggapan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dominasi Golkar, sehingga dengan upaya pemerintah pada muktamar PPP pada tahun 1989 Naro digantikan dengan Buya Isma'il Hasan Metarimum.

Pencalonan tersebut merupakan salah satu upaya dari musuh-musuh Naro untuk menurunkan posisinya dari Ketua Umum PPP.[147] Naro sebagai ketua umum dengan sikap otoriter membuat banyak kalangan terutama NU dan beberapa kader PPP kurang setuju terhadap kepemimpinannya. Jika menelisiki dari bab-bab sebelumnya

[146] Husaini Tamrin, *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2018
[147] Hafid Maksum, *Wawancara*, Jombang, 27 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalinya NU khittah salah satu sebabya adalah dikarenakan kepemimpinan Naro yang terlalu otoriter.

Oleh karena itu, menurut penulis upaya pencalonan Naro merupakan salah satu strategi politik untuk menurunkan Naro. Mereka membujuk agar Naro mencalonkan diri sebagai wakil, sedangkan disisi lain mereka tahu upaya pencalonan Naro akan direspon negatif oleh pemerintah terutama Presiden Soeharto, sehingga akan ada upaya pemerintah untuk menurunkan Naro dari posisi Ketua Umum PPP yang dianggap akan mengancam kesetabilan politik orde baru.

B. Partai Persatuan Pembangunan pada Masa Kepemimpinan Isma'il Hasan Metarium (1989-1994)

Isma'il Hasan Metarium atau yang lebih dikenal dengan Buya Islama'il lahir pada tanggal 4 April 1929 di Aigil, Kabupaten Pidie, Nanggro Aceh Darussalam. Ayahnya bernama Tengku Hasan, yang merupakan ulama di tempat asalnya. Pendidikan pertama beliau secara formal dimulai dibangku Sekolah Rakyat (SR), dilajutkan dengan masuk Madrasah, yang merupakan sekolah agama dengan bentuk klasik dan kemudian beliau masuk di sekolah menengah Islam (SMI). Setelah tamat SMI beliau pindah ke Jakarta dan melanjutkan ke SMA Negeri 3 dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[148]

[148] Ari, " Buya Isma'il Metarium", Media Dakwah No 184 (12 Oktober 1989), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karir beliau dimulai semenjak remaja, salah satunya adalah bergabung dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) di Banda Aceh dan pernah menjadi Wakil Ketua PII cabang Jakarta. dibangku perkuliahan ia aktif menjadi kader Himpuna Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjadi Ketua Umum HMI antara tahun 1957-1960. Terjunnya beliau didunia politik dimulai sejak bergabung dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Pada tahun 1971 beliau terpilihi menjadi aggota DPR RI, ketika Pramusi melebur kedalam PPP beliau diamanahi menjabat sebagai sekretaris Fraksi PPP mulai tahun 1973.

Buya Isma'il terpilih menjadi Ketua Umum partai persatuan pembangunan (PPP) pada tahun 1989, menggantikan H.J. Naro. Buya Isma'il terpilih dalam muktamar II PPP tahun 1989 di dan kemudian terpilih kembali pada muktamar ke III tahun 1994.[149] Terpilihnya Buya Isma'il mejadi salah satu solusi untuk menghadapi suasana ketegangan politik antara NU dan MI. Dengan terpilihnya Buya Isma'il yang memiliki kepribadian santun dan juga berasal dari kalangan ulama' diharapkan mampu mengakomodir semua kalangan baik NU dan MI.

Berbagai pandangan pro dan kontra membarengi kepemimpinan Buya Isma'il. Berbagai kelompok baik yang pro maupun yang kontra memiliki alasan tersendiri dalam menilai kepemimpinan Buya. Kelompok pro berpendapat bahwa Buya memimiki kepemimpinan yang sejuk dan berhasil meredam pertikaian yang terjadi di internal PPP, dengan kata lain

[149] Tim Media PPP, "Sejarah PPP", dalam, www.ppp.or.id (25 April 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok ini lebih berpandangan pada masalah internal partai. Sedangkan kubu kontra, beranggapan bahwa kepemimpina Buya dianggap lamban dalam mengambil sebuah kesepakatan, hal ini ini tercermin dalam sikap diam Buya dalam laporan kecurangan di berbagai daerah yang dialami PPP pada pemilu tahun 1992.[150]

Berbagai penilaian terhadap kepemimpinan Buya Isma'il dinggap wajar jika meilihat proses terpilihnya Buya menjadi Ketua Umum PPP. pada muktamar II PPP tahun 1989, nama Isma'il Hasan sama sekali tidak masuk dalam daftar nominasi calon ketua umum. Setelah Naro yang secara politisi tidak mungkin terpilih, unsur MI mulai menjagokan tokoh lain selain Buya Isma'il tetapi karena adanya kendala yang membuat tokoh tersebut tidak dapat maju menjadi ketua umum, akhirnya di usulkanlah Buya Isma'il menjadi ketua umum. Pada awalnya Buya Isma'il menolak setengah mati pencalonan tesebut, beliau khawatir jika dia yang maju maka akan dianggap megkhianati kesepakatan MI. Proses demikianlah yang mengantarkan Buya menuju kursi satu PPP. oleh sebab itu banyak pertimbangan yang dilakukan Buya ketika mengambil langkah politik dikarenakan banyaknya beban Psikopolitik, dikarenakan tidak semua unsur mendukungnya.

Kembalinya Suara NU ke PPP pada Pemilu tahun 1992

Terpilihnya Buya Isma'il yang merupakan sosok Ulama yang karismatik dan tidak abisius membuat banyak kalangan terutama NU

[150] Choiril, "Menilai kepemimpinan Buya Isma'il", Panj Masyarakat (11-14 Agustus. 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai melirik PPP sebagai salah satu wadah asprasinya. Adanya I'tikat baik dari Buya untuk mengembalikan stabilitas internal PPP dengan NU, dan upaya tersebut disambut baik dengan tokoh-tokoh NU, walaupaun sebagian besar masih banyak warga NU yang tetap bepegang teguh dengan pendirinnya kembali ke khittah. Sikap Buya yang lebih banyak menimbang dari pada memutuskan sepihak terbukti sangat efektif dalam mengembalikan kerukunan di internal PPP. hubungan antara NU dan PPP secara berangsur mulai mencair, diatambah lagi kepandaian Buya dalam menjalin hubungan dengan para ulama NU dan tokoh-tokoh di pesantren.[151]

Upaya Buya Isma'il untuk menarik suara NU yaitu dengan memasukan orang NU sebagai Sekjen PPP mendampingi dirinya yaitu Matori Abdul Djalil, dengan tujuan agar mampu lebih meredam konflik internal PPP. Tetapi dilain pihak upaya Buya Isma'il yeng lebih banyak menimbang daripada memutuskan membuat banyak kalangan yang beranggapan PPP lamban dalam bergerak dalam menghadapi dinamisnya perpolitikan era orda baru. Hal ini mengakibatkan tidak signifikannya perolehan suara PPP pada pemilihan umum tahun 1992. PPP hanya mampu menambah 1 kursi pada Pemilu tahun 1992 jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1987. Kepercayaan NU ini terbukti dengan bertambahnya kursi di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan

[151] Masykur Hasyim, *Wawancara,* Surabaya, 14 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basis kuat NU tetapi di lain pihak PPP kehilangan banyak kursi di luar Jawa.

Tabel 4

Hasil Pemilihan Umum tahun 1992[152]

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan	16.624.647	62
2.	Partai Golongan Karya	66.599.331	282
3.	Partai Demokrasi Indonesia	14.565.556	56

Sumber: Diambil dari www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id. Diakses tanggal 18/06/2018.

[152] Tim Keputakaan Presiden, "Pemilihan Umum Tahun 1992", dalam www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id (25 April 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, Perti dan PSII. PPP terlahir dilatarbelakangi adanya kebijakan pemerintah orde baru pada tanggal 5 Januari 1973 untuk mengembalikan stabilitas negara setelah berakhirnya pemerintahan orde lama. Dalam perkembangannya PPP mampu meraih 99 kursi di DPR RI pada pemilihan umum tahun 1977 dan mendapatkan 96 kursi di DPR RI pada pemilihan umum tahun 1982.
2. Proses NU untuk menuju khittah sudah mulai pada muktamar NU ke 22 tahun 1956 di Jakarta dan baru disahkan pada muktamar NU ke 27 tahun 1984 di Situbondo. Terdapat berbagai faktor baik interen maupun eksteren yang melatarbelakangi kembalinya NU ke khittah. Dalam proses NU menuju khittah terdapat upaya tarik menarik antara kubu NU yang tetap berpolitik melalui PPP dan yang menginginkan keluar dari PPP. upaya tarik menarik berakhir setelah kubu NU yang menginginkan keluar dari politik mampu mengembalikan NU ke khittahnya sebagai jam'iyah diniyah.
3. Pasca kembalinya NU ke khittah terdapat berbagai perubahan sikap PPP terhadap NU diantaranya adalah pada masa H. Djailani Naro (1984-1989) yang lebih banyak melakukan upaya untuk menghadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembosan dari NU dan pada masa Buya Isma'il Metareum (1989-1994) yang merupakan upaya PPP untuk mengembalikan suara NU.

B. Saran

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan maupun pengumpulan sumber-sumber yang ada dalam skripsi yang berjudul Partai Persatuan Pembangunan Pasca kembalinya NU ke khittah 26 tahun 1984-1994, oleh karena itu penulis berharap agara penilitian ini dapat dilanjutakan dan disempurnakan oleh penelitian selanjutnya dengan memperbaiki baik dalam hal penyusunan dan kelengkapan sumber. Penulis juga berharap penelitian sederhana ini mampu memberikan sumbangan keilmuan kepada jurusan Sejarah Peradaban Islam khususnya, dan UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya.
2. Dari penelitian ini, bagi PPP mempu memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh NU dalam PPP yang disusun secara rapi dan bagi pengurus PPP diharapkaan mampu memberikan sedikit gambaran sejarah tentang hubungan antara PPP dan NU dari masa ke masa, meskipun penulis menyadari masih banyak kekuarangan yang ada di dalam penulisan ini, sehingga penulis mengharapkan adanya pembetulan dari kalangan manapu terutama kader-kader PPP.
3. Diharapkan pula bagi masyarakat umum atau para pembaca skripsi Partai Persatuan Pembangunan Pasca Kembalinya NU ke khittah 26 tahun 1984-1994 dapat berguna untuk menambah khazanan ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan tentang sejarah dan dapat mengambil pelajaran dari skripsi ini. Termasuk salah satunya adalah bagaimana sejarah PPP yang merupakan partai politik Islam yang dibentuk pada masa orde baru hingga mampu tetap eksis menajadi partai politik sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah.* Jakarta: Logis Wacana Ilmu. 1999.

Abiddin, Zainal. *Peta Politik Islam Pasca Soeharto.* Jakarta: Pustaka LP3ES. 2003.

Aminuddin. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Apter, E. David. *Pengantar Analisa Politik.* Terj. Setiawan, Abadi. Jakarta: LP3ES. 1988.

Effendy, Selamet, dkk,. *Dinamika Kaum Santri.* Jakarta: Rajawali. 1983.

Fadeli, Soeleiman dan Subhan, Mohammad. *ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Utsuwah*. Surabaya: Khalista, 2007.

Feillard, Andree. *Nu Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, da Makna.* Yogyakarta: LKiS. 2009.

Hakim, Abdul, Atang. *Metodologi Study Islam.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Hasyim, Maskur. *Menusantarakan Politik Islam Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan.* Surabaya: Yayasan Sembilan Lima. 2002.

Hidayah, Soleh. "NU Setelah kembalinya ke Khittah 1926". Skripsi: Fakutas Adab dan Humaniora. 1989.

Ida, Laode. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.

Karim, Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1991.

_____. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995.

Ma'arif, A. Syafi'l. *Islam dimasa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.* Jakarta: Prisma. 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'sum, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Madjid, Dien, M. dan Wahyudi, Johan. *Ilmu Sejarah: Sebuah pengantar*. Jakarta: Kencana. 2014).

Makfoedz, Maksoem. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulamm*. Surabaya:Yayasan kesatuan Ummat. 1982.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU setelah kembali ke Khiittah 26*. Jakarta: Erlangga. 1992.

Mas'oed, Mohtar. *Ekonomi dan Sruktur Politik Orde Baru 1966-1977*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Purwantana. *Partai Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.

Renier, J. G. *Metodologi dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terj. Muin, Umar. Yogykarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Thaba, Aziz, Abdul. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996 Basri, Hasan. *KHR. As'ad Syamsul Arifi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Surabaya: CV. Sahabat ilmu.1993.

Ulum, Bahrul. *"Bodohnya NU" atau "NU Dibodohi", Jejak langka NU Era Reformasi: menguji Khiitah, Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Ar Ruzz. 2002.

Skripsi

Sa'adah, Lailatus. "Reinterpretasi Khittah 1925: Study tentang hubungan NU degan partai-partai berbasis NU 1998-2003". Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora. 2004.

Setiawan, Eka, Edi. "Mahbub Djunaidi: Studi pemikiran tentang Khittah Plus NU tahun 1987". Skripsi: Fakultas Adab dan Humanioran. 2016.

Suparno. "Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia (Pembaharuan Politik Pasca Orde Baru Tahun 1998-2004)". Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora. 2004.

Rasidi, Hambali, "Studi tentang pemikiran NU Pola gerak NU kembali ke Khittah 1926". Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 1999.

Tesis

Hakim, Luqman, Habib. "Perubahan Pasal-pasal dalam RUU Perkawinan NO. 1 Tahun 1973: Study Atas Peran Partisipasi Kiai Nahdlatul Ulama' dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses Legislatif Drafting". Tesis: Program Study Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara. 2015.

Arsip

Hasil Munas NU dan Munktamar NU 27 di Situbondo.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tentang Susunan Personalitas DPP dan majelis Syuro. tahun 1977.

Sumber Wawancara:

Hasyim, Masykur. *Wawancara.* Surabaya. 14 Mei 2018.
Maksum, Hafid. *Wawancara*. Jombang. 27 Maret 2018.
Tamrin, Husaini. *Wawancara.* Surabaya. 23 Maret 2108.
Zein, Noman, Didik. *Wawancara.* Surabaya. 27 Maret 2018.

Majalah dan Koran:

Harian Pelita. 31 Oktober 1985.
Harian Suara Indonesia. 14 April 1987.

Kompas, 2 Februari 1982.

Kompas, 21 Maret 1987.

Panj Masyarakat. *Menilai kepemimpinan Buya Isma'il.* (11-14 Agustus. 1994).

Sianr Harapan. 14 Desember 1883.

Surabaya Post. 3 Februari 1983. 4.

Surabaya Post. Selasa 2 Februari 1982.

Surabaya Post. Selasa, 16 Februari 1982.

Sumber Internet

Dikutip dari www.kepustkaan-presiden.pnri.go.id. pada tanggal 25 April 2018.

Dikutip dari www.ppp.or.id pada tanggal 25 April 2018.

Wikipedia.org, diakses pada tanggal 26, Mei 2018.

www.PPP.or.id, diakses pada tanggal 26, Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id